

PENGLOLAAN POTENSI DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH:

NAMA : AFRIDAL
NOMOR INDUK MAHASISWA : 147120182
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2018**

PENGLOLAAN POTENSI DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

TESIS

Oleh:

AFRIDAL

Nim: 147120182

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 04 Januari 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Nurman, S.Sos, M.Si

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Anggota

Anggota

Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Mengetahui;
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Saipul Bahri, M.Ec

PENGLOLAAN POTENSI DESA DALAM PEMANGUNAN DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

TESIS

NAMA : AFRIDAL
NOMOR INDUK MAHASISWA : 147120182
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I
Pekanbaru,.....

Dr. Nurman, S.Sos, M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru,

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau

Lilis Suryani, S.Sos, M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Ilmu Administrasi Publik peserta ujian komprehensif penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afridal
NPM : 147120182
Program Studi : Ilmu Administrasi
Bidang Kajian Utama : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Tesis : Pengelolaan Potensi Desa Dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Desember 2018

Pembuat Pernyataan

Afridal

**PENGLOLAAN POTENSI DESA DALAM PEMBANGUNAN
DES GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KABUPATEN KAMPAR**

**OLEH:
AFRIDAL
NIM: 147120182**

ABSTRAK

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sektor sumber daya yang ada menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian tujuan kerja tertentu. Sedangkan pengelolaan potensi desa adalah kemampuan pemerintah desa dalam menggali, mengelolah dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa. Sejalan dengan itu, pengelolaan potensi desa dalam penelitian ini yaitu sejauh mana pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu mengelolah dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber ekonomi lokal yang ada di Desa Gema untuk menghasilkan pendapatan bagi desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Gema tidak mampu mengelolah potensi-potensi yang ada di Desa Gema Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang mana sumber data penelitian berasal dari hasil kuisisioner. Adapun jumlah sampel penelitian sebanyak 40 orang dan teknik yang dipakai *random sampling*. Teknik analisis data menggunakan teknik kuantitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 137 jawaban responden memberikan tanggapan bahwa pengelolaan potensi desa dalam pembangunan sudah terlaksana dengan baik. Sebanyak 204 jawaban responden memberikan tanggapan bahwa pengelolaan potensi desa dalam pembangunan sudah terlaksana dengan cukup baik dan sebanyak 419 jawaban responden memberikan tanggapan bahwa pengelolaan potensi desa dalam pembangunan sudah terlaksana dengan kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan potensi desa dalam pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik.

*Kata Kunci: Pengelolaan Potensi Desa, Sumber Daya Manusia,
Sumber Daya Alam, Sumber Daya Ekonomi Lokal*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**MANAGEMENT OF VILLAGE POTENTIALS IN DEVELOPMENT
DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KAMPAR DISTRICT**

**BY:
AFRIDAL
NIM: 147120182**

ABSTRACT

Management is the control and utilization of all existing resource sectors according to a plan needed for the completion of certain work objectives. Whereas the management of village potential is the ability of the village government to explore, manage and develop the potential that exists in the village with the aim of improving the welfare and economy of the village community. In line with that, the management of village potential in this study is the extent to which the village government in this case is the Village Head and Village Consultative Body (BPD) capable of managing and utilizing the potential of human resources, natural resources and local economic resources in Gema Village to generate income for the village and be able to improve the welfare of the community. However, in its implementation, the Gema Village Government is not able to manage the potential that exists in Desa Gema. The type of approach used in this study is a quantitative method in which the research data source comes from the results of the questionnaire. The number of research samples is 40 people and the technique used is random sampling. The data analysis technique uses quantitative techniques. From the results of the study it was found that as many as 137 respondents' answers that the management of village potential in development was well implemented. 204 responses of respondents that the management of village potential in development has been carried out quite well and as many as 419 respondents answered that the management of village potential in development has been poorly implemented. Then it can be concluded that the management of village potential in the development of the village of Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu in Kampar District as a whole has not been well implemented.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Keywords: Management of Village Potential, Human Resources, Natural Resources, Local Economic Resources



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul " Pengelolaan Potensi Desa Dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar " ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister strata dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi manapun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada:

1. Orang tua, Kakak, Abang, Adik, Istri dan anak-anakku karena telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
2. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin
3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
4. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
5. Bapak Dr. Nurman, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis

menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian tesis ini.

9. Seluruh jajaran dan perangkat Pemerintahan Desa Gema beserta masyarakat yang telah rela menjadi informan dan narasumber dalam penelitian penulis. Berkat kerjasama dan partisipasi kalian, Tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan maksimal.
10. Teman-teman dan rekan-rekan satu angkatan Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini .
11. Semua pihak yang telah ikhlas membantu penulis sehingga dengan bantuan yang mereka berikan, penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Amiin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa dan dapat menambah khazanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufik wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 17 Desember 2018
Penulis

Afridal

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBARAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latarbelakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II KERANGKA TEORITIS	
2.1. Konsep Administrasi Negara	14
2.1.1. Pengertian Administrasi Negara	14
2.1.2. Ruanglingkup Administrasi Negara	16
2.1.3. Prinsip-Prinsip Dasar Administrasi Negara	19
2.2. Konsep Organisasi	21
2.2.1. Pengertian Organisasi	21
2.2.2. Bentuk-bentuk Organisasi	23
2.2.3. Ciri-ciri Organisasi Ideal	24
2.3. Konsep Manajemen Pemerintahan	26
2.3.1. Pengertian Manajemen Pemerintahan	26
2.3.2. Fungsi Manajemen Pemerintahan	28
2.3.3. Manajemen Pemerintahan Desa	31
2.3.4. Keuangan dan Aset Desa	32
A. Keuangan dan Pendapatan Desa	32
B. Aset Desa	35
2.3.5. Pengelolaan Potensi Desa	37
A. Potensi Sumber Daya Manusia	39
B. Potensi Sumber Daya Alam	41
C. Potensi Sumber Daya Ekonomi	42
2.4. Konsep Pembangunan	43
2.4.1. Pengertian Pembangunan	43
2.4.2. Pembangunan Desa	45
2.4.3. Asas-asas Pembangunan Desa	49
2.5. Kerangka Berpikir Penelitian	50
2.6. Konsep Operasional, Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran ...	51

2.6.1. Konsep Operasional	51
2.6.2. Operasionalisasi Variabel	51
2.6.3. Pengukuran	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	54
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	55
3.3. Populasi Dan Sampel	56
3.4. Teknik Penentuan Informan dan Responden	57
3.4.1. Teknik Penentuan Informan	57
3.4.2. Teknik Penentuan Responden	58
3.5. Jenis Dan Sumber Data Penelitian	58
3.6. Teknik Pengumpulan Data	59
3.7. Teknik Analisis Data	59
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4.1. Sejarah Lahirnya Desa Gema	62
4.2. Keadaan Geografis	63
4.3. Keadaan Demografis	64
4.4. Sosial, Budaya dan Ekonomi	66
4.4.1. Pendidikan	66
4.4.2. Mata Pencaharian	68
4.4.3. Agama	70
4.4.4. Kesehatan	70
4.5. Organisasi Pemerintahan Desa	71
BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	
5.1. Analisis Data Penelitian	82
5.1.1. Gambaran Subjek Penelitian	82
A. Berdasarkan Jenis Kelamin	82
B. Berdasarkan Tingkat Umur	83
C. Berdasarkan Tingkat Pendidikan	84
5.2. Hasil Penelitian	85
5.2.1. Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	85
A. Pengelolaan Potensi Dari Sektor Sumber Daya Manusia ..	86
B. Pengelolaan Potensi Dari Sektor Sumber Daya Alam	89
C. Pengelolaan Potensi Dari Sektor Sumber Ekonomi Lokal.	92
5.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	98
A. Faktor Pendukung	98
B. Faktor Penghambat	99
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	101
6.2. Saran	103

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
I.1 Realisasi Pembangunan Fisik Dan non Fisik Desa Gema	6
I.2 Rekapitulasi APBDesa tahun Anggaran 2014-2018	8
I.3 Jenis Pembangunan Fisik di Desa Gema tahun 2016-2018	9
I.4 Perincian PADesa Gema tahu 2014-2018	10
I.5 Pengelolaan Potensi Desa Gema tahun 2014-2018	11
II.1 Operasiolisasi Variabel	52
III.1 Populasi dan Sampel Aparatur Pemerintahan Desa Gema	56
III.2 Populasi dan Sampel Masyarakat Desa Gema	57
IV.1 Jumlah Penduduk Gema Menurut Jenis Kelamin tahun 2018	64
IV.2 Jumlah Penduduk Gema Menurut Umur tahun 2018	65
IV.3 Jumlah Sarana Pendidikan di desa Gema	66
IV.4 Jumlah Penduduk Gema Menurut Tingkat Pendidikan	67
IV.5 Jumlah Penduduk Gema Menurut Mata Pencaharian	69
IV.6 Jumlah Rumah Ibadah Desa Gema	70
IV.7 Struktur Organisasi dan Kelembagaan	72
V.1 Informan dan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
V.2 Informan dan Responden Berdasarkan Tingkat Umur	83
V.3 Informan dan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	84
V.4 Pengelolaan Potensi dari Sektor Sumber Daya Manusia	87
V.5 Pembangunan Fisik Desa Gema tahun 2016-2018	88
V.6 Pengelolaan Potensi dari Sektor Sumber Daya Alam	90
V.7 Pengelolaan Potensi dari Sektor Sumber Daya Ekonomi Lokal	93
V.8 Uraian Biaya Ganti Ongkos Cetak Surat/Blangko	94
V.9 Pengelolaan Potensi Desa Dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	96
V.10 Pendapatan Desa Gema Tahun Anggaran 2018	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Berfikir Penelitian	50
IV.1 Struktur Pemerintahan Desa Gema	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang Masalah

Keberadaan suatu negara merupakan perwujudan dari keberadaan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan untuk mencapai tujuan bersama (Alfian, 2018:187).

Dalam konteks Indonesia, tujuan utama terbentuknya negara yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Lihat: Pembukaan UUD 1945 Amandemen Ke Empat).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur (Isjwara, 2009:172).

Agar tujuan bangsa Indonesia diatas dapat terwujud dengan baik, perlu dibentuknya sebuah Pemerintahan yang mampu mengatur dan menjalankan tugas tersebut. Maka disusunlah Pemerintahan bangsa Indonesia itu kedalam 3 tingkatan, yaitu: 1). Pemerintah Pusat, 2). Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan, 3.) Pemerintah Desa.

Selanjutnya, untuk mengakomodir satuan-satuan masyarakat yang hidup di Desa, nagari, kampung, maupun marga yang tersebar diseluruh daerah yang ada di Indonesia, maka konstitusi melalui Pasal 18 B (ayat 2) UUD 1945 menjelaskan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Lihat: Amandemen kedua UUD 1945 Amandemen Ke Empat).

Undang-Undang di atas memberikan jaminan atas keberadaan satuan-satuan masyarakat hukum/adat untuk melangsungkan kehidupan mereka dalam satu organisasi pemerintahan paling rendah yang disebut dengan “desa”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum/adat yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Widjaja, 2012:4).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya, dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Desa juga dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di atas, desa diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa meliputi

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintahan desa.
2. Melaksanakan proses pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa .
3. Berkewenangan melakukan berbagai bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat dari masyarakat setempat yang telah ada semenjak desa tersebut terbentuk (Rauf & Maulidiah, 2015:114).

Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam rangka pemerataan pembangunan, desa memerlukan perhatian yang lebih besar karena merupakan tempat hidup sebagian besar masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan pedesaan, pemerintah desa perlu melakukan pengelolaan potensi yang ada di desa. Pengelolaan potensi desa merupakan kegiatan penggalian dan

pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber ekonomi lokal yang ada di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan/penggunaan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan untuk mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan (Adisasmita, 2006:59).

Pembangunan pedesaan dapat pula dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif. Menurut Adisasmita (2006:60) pengelolaan potensi desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa yang efektif dan efisien, perlu adanya pengelolaan potensi desa yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Karena setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan program organisasi dalam proses pencapaian tujuan.

Ada dua bidang pokok yang menjadi sasaran pembangunan desa, yaitu bidang fisik maupun bidang non fisik. Untuk bidang fisik diwujudkan melalui berbagai sarana dan prasarana desa dengan harapan dapat meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran bidang non fisik

diwujudkan melalui penciptaan kondisi masyarakat desa yang mampu menunjukkan kreatifitas yang tinggi, dinamis dan mandiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan pembangunan desa, maka ada dua hal yang mesti dipahami, *Pertama*: Pembangunan desa yang bersifat sarana prasarana dan infrastruktur. *Kedua*: Pembangunan masyarakat desa yang berfokus pada sumber daya manusia, meliputi: partisipasi, pemberdayaan dan gotong-royong (Nurman, 2015:241).

Untuk itu pemerintah desa dituntut untuk mampu meningkatkan dan memanfaatkan secara maksimal sumber-sumber pendapatan dengan cara menggali serta mengelolah potensi-potensi yang ada di desa melalui pengembangan serta pemanfaatan sumber daya yang ada agar menjadi pendapatan asli desa.

Berkaitan dengan itu, maka pengelolaan potensi desa mesti dilakukan oleh setiap desa tidak terkecuali juga oleh Desa Gema. Keberadaan Desa Gema sudah diakui pada Tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, maka kampung baru ditepi Sungai Kampar kiri tersebut diberi nama GEMA, yang merupakan singkatan dari Gelora Empat Lima (sumber: wawancara dengan tokoh adat Gema “*Datuok Panglimo Koto*”).

Desa Gema merupakan salah satu dari 20 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Desa Gema juga merupakan Pusat Ibu Kota Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Jarak antara Desa Gema dengan Ibukota Kabupaten Kampar yaitu 73 KM sedangkan jarak dengan Ibukota Provinsi yaitu 85 KM (sumber: Kaur Pemerintahan Desa Gema 2018).

Dari segi pembangunan, desa gema sudah dapat dikategorikan sebagai desa yang maju. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan sarana prasaran pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pemerintahan desa dan pertanian yang mampu menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Adapun pembangunan tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Realisasi Pembangunan Fisik dan Non Fisik Di Desa Gema

No <i>1</i>	Bidang <i>2</i>	Realisasi Pembangunan <i>3</i>
1	Pendidikan	a. Gedung Taman Kanak-Kanak (TK) b. Gedung Sekolah Dasar c. Gedung Sekolah MDA d. Gedung TPQ/TPA e. Gedung Play Group
2	Kesehatan	a. Puskesmas b. Sumur Bor Umum c. Bak Air Bersih Umum
3	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Umum Skala Propinsi b. Jalan Desa Penghubung Dusun c. Jalan setapak/Gang d. Balai Desa
4	Lingkungan Hidup	a. Adanya Sungai b. Adanya Hutan c. Adanya Tambang Galian C d. Adanya Tanaman Hijau e. Adanya Tanah Kas Desa f. Tambatan perahu/dermaga

		<ul style="list-style-type: none"> g. Pasar desa h. Tempat pelelangan ikan
5	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial b. Adanya Majelis Ta'lim Desa c. Adanya Mesjid d. Adanya Mushollah e. Adanya Lap. Bola Kaki f. Adanya Kegiatan Ibu-Ibu PKK g. Adanya Arisan Hewan Qurban h. Adanya Grup Dzikir
1	2	3
6	Koperasi dan Usaha Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Kelompok SPP Ibu Mandiri b. Adanya (P4K) Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil c. Adanya Usaha Pembuatan Kerupuk d. Adanya Bengkel Motor e. Adanya Bengkel Las f. Adanya Bengkel Elektronik g. Adanya Pangkalan Minyak Tanah h. Adanya Pengecer Bensin i. Adanya Warung Minuman dan Makanan
7	Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Gedung Kantor b. Adanya Personil dan Struktur Aparatur Desa c. Adanya Personil dan Struktur BPD d. Adanya Kendaraan Dinas Roda Dua e. Adanya Sarana Kantor Desa
8	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Kebun Karet Kas Desa b. Adanya Kebun Sawit c. Adanya Masyarakat Bertani Pangan dan Palawija d. Adanya Perkebunan Karet
9	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Arum Jram b. Adanya Tebing Pinggiran Sungai Subayang yang sudah di Beton

Sumber: Pemerintahan Desa Gema 2018

Pada hal dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa sumber daya alam dan usaha ekonomi lokal yang ada di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar mempunyai potensi ekonomis yang layak dikelola dan dikembangkan dengan baik agar menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat maupun desa, sehingga menambah APBDesa.

Sumber-sumber pendapatan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Untuk melakukan pembangunan tersebut sebagaimana yang terlihat pada tabel 1.1 di atas, Pemerintah Desa Gema selalu mengandalkan sumber-sumber pendapatan atau keuangan desa yang berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga penggunaan anggaran seringkali dipergunakan dalam bidang pembangunan fisik.

Dilihat dari ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Keuangan Desa Gema selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil observasi peneliti di lapangan terhadap rekapitulasi APBDesa Gema dari tahun 2014-2018, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.2

Rekapitulasi APBDesa Tahun Anggaran 2014-2018

No	Tahun	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan	Rasio
1	2014	Rp 759.550.000	Rp 859.550.000	-	-
2	2015	Rp 763.900.000	Rp 863.900.000	-	Naik
3	2016	Rp 1.254.428.000	Rp 1.354.428.000	-	Turun
4	2017	Rp 1.246.630.000	Rp 1.346.630.000	-	Turun
5	2018	Rp 1.275.177.056	Rp 1.475.177.056	-	Naik

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Dari tabel di atas terlihat naik turunnya APBDesa Gema setiap tahunnya. Terlihat juga didalam rekapitulasi diatas APBDesa pada tahun 2018 adalah APBDesa yang terbesar, yaitu pendapatan sebesar Rp 1.275.177.056 dengan belanja sebesar Rp 1.475.177.056. Dari hasil analisis peneliti, jumlah pendapatan Desa Gema tidak sebanding dengan total belanja desa dalam satu tahun anggaran. Sementara itu pendapatan asli desa yang dimiliki Desa Gema tidak mampu menutupi pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam satu tahun.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan dari tahun 2016 sampai 2018 oleh Pemerintah Desa Gema, pembiayaannya berasal bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. sedangkan dari hasil pengelolaan potensi desa belum ada. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.3
Jenis Pembangunan Fisik di Desa Gema Tahun 2016-2018

Tahun	Jenis Pembangunan Fisik	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
2016	1. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase/gorong-gorong di Desa Gema	400.000.000	Pemerintah
	2. Turap	600.000.000	Pemerintah
2017	1. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase/gorong-gorong di Desa Gema	260.000.000	Pemerintah
	2. Kegiatan peningkatan jalan dan jembatan di Desa Gema	400.000.000	Pemerintah

2018	1. Kegiatan pembangunan drainase di Desa Gema	480.000.000	Pemerintah
	2. Kegiatan peningkatan jalan dan jembatan di Desa Gema	550.000.000	Pemerintah

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Dari tabel 1.3 diatas terlihat pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Gema, dimana dana yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pemerintah. Sementara dari hasil potensi desa tidak ada. Hal itu disampaikan oleh Bapak Aidil Fitri selaku Sekretaris Desa bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan fisik di Desa berasal dari pemerintah, sedangkan dari hasil pengelolaan potensi desa tidak ada. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan kondisi keuangan desa hanya dihabiskan pada aspek pembangunan-pembangunan yang bersifat fisik saja. Kondisi ini membuat banyak program di sektor-sektor lain tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Untuk mengetahui perincian Pendapatan Asli Desa Gema pada tahun 2014-2018 berdasarkan hasil survey peneliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.4
Perincian PADesa Gema Tahun 2014-2018

No	Tahun	Uraian Besarnya PADesa Tahun 2011-2015					Jumlah (Rp)	Rasio
		Hasil Usaha Desa	Hasil Kekayaan Desa	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Hasil Gotong Royong	Lain-Lain PAD desa yang Sah		
1	2014	-	Rp 5.500.000	-	-	Rp 1.100.000	Rp 6.600.000	-
2	2015	-	Rp 6.460.000	-	-	Rp 1.900.000	Rp 8.360.000	Naik
3	2016	-	Rp 6.500.000	-	-	Rp 2.100.000	Rp 8.600.000	Naik
4	2017	-	Rp 7.100.000	-	-	Rp 2.500.000	Rp 9.600.000	Naik
5	2018	-	Rp 7.750.000	-	-	Rp 4.250.000	Rp 12.000.000	Naik
<i>Jumlah</i>			Rp 33.310.000			Rp 11.850.000	Rp 45.160.000	

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Dari tabel I.4 diatas terlihat jumlah Pendapatan Asli Desa Gema pada tahun 2014-2018. Dari perincian Pendapatan Asli Desa tersebut terlihat dengan

kelas jenis-jenis Pendapatan Asli Desa dari tahun 2014-2018 yang sudah dikelola dan digunakan untuk membiayai kebutuhan desa yang dalam hal ini hanya mengandalkan pada hasil tanah desa dan ganti ongkos blangko, sehingga sektor-sektor lainnya masih banyak yang terabaikan.

Berdasarkan tabel 1.4 diatas juga terlihat sedikitnya PADesa yang dihasilkan oleh desa. Seharusnya dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa, maka Pemerintah Desa bisa mengelolanya untuk menghasilkan PADesa yang lebih besar yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Dari Pendapatan Asli Desa tersebut, berdasarkan hasil survey peneliti bahwa pengelolaan potensi desa pada tahun 2014-2018 di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar rinciannya terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.5
Pengelolaan Potensi Desa Gema Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jenis Potensi Desa	Jumlah (Rp)
1	2014	a. Tanah kas desa	Rp 1.500.000
		b. Ganti ongkos cetak surat/blangko	Rp 1.100.000
2	2015	a. Tanah kas desa	Rp 2.460.000
		b. Ganti ongkos cetak surat/blangko	Rp 1.090.000
3	2016	a. Tanah kas desa	Rp 3.500.000
		b. Ganti ongkos cetak surat/blangko	Rp 2.100.000
4	2017	a. Tanah kas desa	Rp 4.106.000
		b. Ganti ongkos cetak surat/blangko	Rp 2.580.174
5	2018	a. Tanah kas desa	Rp .5550.000
		b. Ganti ongkos cetak surat/blangko	Rp 2.450.000

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Dari tabel I.5 diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan potensi desa di desa Gema hanya mengandalkan dari hasil kekayaan desa yaitu tanah kas desa

berupa kebun karet seluas 2 hektar serta lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah berupa ganti ongkos cetak surat/blangko .

Selain potensi-potensi desa yang sudah dikelola oleh Pemerintah Desa diatas, Pemerintah Desa pada tahun 2015 juga sedang mengusahakan mengelola potensi desa yang lain yaitu pembuatan pelelangan ikan. Dengan mengusahakan pengelolaan sektor tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan desa untuk membiayai pembangunan di desa.

Hasil dari pengelolaan potensi desa selama ini hanya digunakan sebagai dana tambahan untuk belanja bantuan sosial, sementara untuk pembangunan fisik masih belum ada. Hal itu disebabkan karena sedikitnya hasil yang didapat oleh Pemerintah Desa dari pengelolaan potensi desa dan karena tidak adanya swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat.

Untuk itu pemerintah desa dituntut untuk mampu meningkatkan dan memanfaatkan secara maksimal sumber-sumber pendapatan berdasarkan pada potensi desanya sendiri yaitu melalui pengembangan serta pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli desa.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul:

“ Pengelolaan Potensi Desa Dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian agar memiliki arah yang jelas, maka perlu dilakukan perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Pengelolaan Potensi Desa Dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor pendukung Pengelolaan Potensi Desa Dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
3. Apa faktor penghambat Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Potensi Desa Dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Pengelolaan Potensi Desa Dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi Ilmu Administrasi Publik dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
2. Secara akademis, sebagai salah satu syarat ujian dalam mendapatkan gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kebijakan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan potensi desa dalam pembangunan dan juga sebagai masukan bagi pihak aparaturnya Pemerintah Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1. Konsep Administrasi Negara

2.1.1. Pengertian Administrasi Negara

Secara epistemologi, Administrasi Negara terdiri dari dua suku kata, yaitu administrasi dan negara. Administrasi di artikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau di arahkan. Menurut Siagian (2011:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Disisi lain, administrasi merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan negara dapat diartikan sebagai publik, klien, konsumen, warga masyarakat dan kelompok kepentingan maupun sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan mempunyai kedaulatan, (Musaneff, 2004:20).

Maka dapat diketahui bahwa administrasi negara adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif, mempunyai peranan penting dalam memformulasikan kebijakan

publik sehingga menjadi bagian dari proses politik (Cahayani, 2003:10). Dalam konteks wacana di Indonesia, istilah administrasi negara lebih dikenal dengan sebutan administrasi publik.

Administrasi negara merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Administrasi publik merupakan metode pemerintahan Negara (proses politik) *administration of publik, for publik, dan by publik*. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik (Mufiz, 2004:47).

Beberapa pengertian lain mengenai administrasi publik dapat dilihat dari pendapat-pendapat Stillman II (dalam Wirawan, 2007:64) sebagai berikut:

1. Administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan.
2. Administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif, mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik, sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk

memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

4. Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Setelah mengetahui defenisi-defenisi administrasi negara (*publik*), ada beberapa hal yang terkandung dalam defenisi tersebut, yaitu (Mufiz, 2004:23):

1. Administrasi publik sebagai seni merupakan suatu proses yang diketahui hanya permulaannya saja sedangkan akhirnya tidak diketahui.
2. Administrasi publik mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas yang hendak dikerjakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.
3. Administrasi publik sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai seni merupakan suatu fenomena sosial.

Dari semua defenisi di atas, ada beberapa makna penting berkenaan dengan hakikat administrasi publik, yaitu (Wirawan, 2007:70):

1. Lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia Yudikatif dan Legislatif.
2. Berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik.

3. Berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah.
4. Bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia *overlapping* dengan administrasi swasta.
5. Diarahkan untuk menghasilkan *public good dan services*;
6. Bidang ini memiliki aspek teoritis dan praktis.

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif yang mempunyai peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik.

2.1.2. Ruanglingkup Administrasi Negara.

Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara (Munaf, 2016:7).

Secara sederhana, administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen. Jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta,

maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik atau pemerintahan, seperti: departemen-departemen dan dinas. Mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah dan *good governance* (Munaf, 2016:7).

Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi publik, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: a). Adanya manusia yang melakukan kerjasama, b). Adanya tujuan yang ingin dicapai, c). Adanya tugas yang hendak dilaksanakan, dan d). Adanya sarana dan prasarana yang mendukung (Sudarmanto, 2009:24)

Dalam konteks pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasaran yang diperlukan dalam proses administrasi publik, tergantung dari berbagai faktor seperti: a). Jumlah orang yang terlibat dalam proses administrasi, b) Sifat tujuan yang hendak dicapai, c) Ruanglingkup serta aneka ragamnya tugas yang hendak dijalankan, dan d) Sifat kerjasama yang dapat diciptakan dan dikembangkan (Kencana, 200:24).

Pada aspek penerapannya, dinamika lingkungan administrasi negara yang sangat tinggi kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang relevansi keberadaan ilmu administrasi negara sebagai administasi pemerintahan. Gugatan

tersebut terutama ditujukan pada fokus ilmu administrasi negara yang dirasa tidak memadai lagi.

Secara tegas Toha (dalam Munaf, 2016:8) mengatakan telah terjadi perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi orientasi ke pasar (*market*). Pasar di sini secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (*public*). Fenomena menurunnya peran negara ini merupakan arus balik dari apa yang disebut *Grindle* sebagai *too much state*, di mana negara pada pertengahan 1980-an terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada jeratan hutang luar negeri, krisis fiskal dan pemerintah yang terlalu sentralistis dan otoriter.

Menurut Dwiyanto (dalam Munaf, 2016:8) setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan semakin menurunnya dominasi peran negara, yaitu:

1. Dinamika ekonomi, politik dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat.
2. Globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikurangnya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi.
3. Tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak bermunculannya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya.
4. Munculnya *hybrid organization* yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis.

Dengan demikian istilah *public administration* tidak tepat lagi untuk diterjemahkan sebagai administrasi negara, melainkan sebagai administrasi publik. Sebab makna publik di sini jauh lebih luas daripada kata negara. Publik di sini menunjukkan keterlibatan institusi-institusi non negara baik di sektor bisnis maupun *civil society* di dalam pengadministrasian pemerintahan.

Konsekuensi dari perubahan makna *public administration* sebagai administrasi publik di sini adalah terjadinya pergeseran fokus ilmu administrasi negara dari yang sebelumnya berfokus pada birokrasi pemerintah menjadi berfokus pada organisasi publik, yaitu birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain (Munaf, 2016:9).

2.1.3. Prinsip-prinsip Dasar Administrasi Negara

Teori administrasi merumuskan strategi spesifik untuk menerapkan struktur birokrasi. Teori administrasi negara menterjemahkan banyak prinsip dasar model birokrasi secara deskriptif ke dalam prinsip praktek manajerial preskriptif.

Menurut Fayol (dalam Kencana, 2007:13-15) mendefenisikan beberapa prinsip dasar administrasi.

1. *Perencanaan* mengarahkan para manajer untuk menganalisa tugas dan tujuan organisasi dan untuk merancang strategi spesifik maupun mengidentifikasi bahan baku dan personil yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuan organisasi. (Untuk mengetahui seberapa jauh prinsip dasar ini memiliki kesamaan dengan “kaidah, aturan dan prosedur yang diformalisasikan” oleh prinsip birokrasi).
2. *Organisasi* mengarahkan para manajer untuk mengalokasikan personil, peralatan dan sumber yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuan organisasi yang diidentifikasi dalam perencanaan.
3. *Kontrol* mengharuskan para manajer menggunakan kewenangan mereka untuk memastikan bahwa tindakan pekerja sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi (untuk mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut dengan prinsip birokrasi).
4. *Bidang pekerjaan* mengarahkan pengembangan kemampuan kerja khusus dari anggota organisasi sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas tertentu sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. (Untuk mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut dengan “spesialisasi peran anggota organisasi”).
5. *Otoritas* memberdayakan para manajer untuk menggunakan kekuasaan dan kontrol terhadap bawahan guna mengarahkan aktivitas mereka terhadap produk organisasi. Bawahan dituntut menghasilkan sesuai kewenangan atasan yang ada dalam organisasi. (Untuk mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut dengan prinsip birokrasi).
6. *Disiplin* mengarahkan semua anggota organisasi untuk menyampaikan kaidah dan panduan organisasi dan hukuman khusus bagi anggota organisasi yang gagal dalam melaksanakan tugas sesuai aturan perusahaan. (Untuk mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut dengan prinsip birokrasi “profesionalisme”).
7. *Kesatuan perintah* menyatakan bahwa setiap anggota organisasi harus menerima arahan dari satu atasan saja dan bertanggung jawab kepada orang tersebut. Prinsip ini berfungsi untuk meningkatkan kejelasan peran kerja dengan cara mengenali siapa yang bertanggung jawab terhadap apa dan siapa yang berwenang terhadap siapa dalam aktivitas organisasi. Rantai scalar menyatakan bahwa anggota organisasi harus menjawab langsung kepada atasan mereka dan mengawasi langsung bawahan

mereka. Rantai scalar membentuk jalur interaksi vertikal di antara atasan dan bawahan sepanjang rantai komando hirarki organisasi. Ia mengidentifikasi rute utama susunan untuk kaidah dan pengarahan yang diikuti dengan jalur komunikasi dan mampu menciptakan interaksi sulit di antara anggota organisasi yang berada dalam posisi rantai komando paralel di dalam organisasi. Untuk mengatasi masalah ini, Fayol menyatakan bahwa dalam lingkungan tertentu (keadaan darurat, misalnya), anggota organisasi dapat berkomunikasi secara horisontal, atau lintas rantai komando secara paralel dengan rekan sekerja untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas organisasi. Prinsip dasar ini mengatasi masalah komunikasi horisontal terbatas di antara anggota organisasi dengan tingkat hirarki yang sama dalam organisasi. Fayol menyebut saluran horisontal, yang dalam efeknya memecah rantai scalar, sebagai “jembatan,” tetapi ia kemudian lebih dikenal dengan “jembatan Fayol”.

8. *Kesatuan arah* menyatakan bahwa anggota organisasi harus satu pikiran, bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan organisasi. Prinsip dasar ini menggambarkan sebuah penekanan terhadap produk organisasi terhadap produk anggota organisasi individual. (Untuk mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut dengan prinsip birokrasi “profesionalisme”).
9. *Bawahan individu bagi kelompok yang lebih besar* mengarahkan anggota organisasi secara individu untuk bertindak sesuai kepentingan organisasi. (Untuk mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut dengan prinsip birokrasi “profesionalisme” yang menekankan pentingnya organisasi untuk berhadapan dengan anggota organisasi individu.

Teori administrasi dikembangkan sebagai panduan deskriptif bagi manajemen organisasi sesuai penggunaan kaidah dan otoritas secara langsung. Di sini diperlihatkan kekuatan dan kelemahan dari teori administrasi. Prinsip dasar deskriptif dari teori administrasi membuat teori tersebut sangat pragmatis dan dapat diaplikasikan pada organisasi bisnis (Hamim, 2005:29).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kegiatan atau kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, administrasi adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula.

2.2. Konsep Organisasi

2.2.1. Pengertian Organisasi

Secara sederhana, organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan ciri : a) terdiri daripada dua orang atau lebih, b) ada kerjasama, c) ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain, d) ada tujuan yang ingin dicapai (Cahyani, 2003: 8).

Sedangkan menurut Musanef (2004:27) memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah keseluruhan daripada sumber-sumber baik yang bersifat manusia maupun yang non-manusia serta pengelompokkan daripada

tugas dan tanggungjawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain organisasi adalah ajang, jaringan tata kerjasama kelompok orang-orang secara teratur dan kontinue untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah ditentukan, dimana di dalamnya selalu terdapat tatacara dan hubungan antara atasan dan bawahan.

Istilah organisasi menurut Syamsi (2004:71) memiliki dua pengertian umum yakni: **Pertama:** Organisasi sebagai lembaga atau kelompok fungsional seperti perusahaan, sekolah, perkumpulan atau badan-badan pemerintahan, **Kedua:** Merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota, sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif.

Suatu organisasi memiliki sedikitnya tiga tingkatan manajerial sebagaimana dikemukakan oleh Kartono (2011:11) yang mencakup: a) Tingkatan Institusional yang membahas hal-hal strategis, b) Tingkatan Manajerial yang berkaitan dengan pengkoordinasian dengan bagian-bagian dalam organisasi, c) Tingkatan Operasional yang membahas permasalahan pekerja.

Apabila ditinjau dari adanya pembagian tugas kerja antar unsur pelaksana dan unsur bantuan maka digunakan dasar

pengorganisasian berdasarkan pendekatan staf dan sehingga ditingkat atas terlihat adanya pihak-pihak yang memberikan pelayanan teknis dan administratif. Sementara itu menurut Sobirin (2007:23) organisasi dapat diartikan dalam dua macam, yaitu: a) Dalam arti statis, yaitu organisasi sebagai wadah tempat dimana kegiatan kerjasama dijalankan, b) Dalam arti dinamis, yaitu organisasi sebagai suatu sistem proses interaksi antara orang-orang yang bekerjasama, baik formal maupun informal.

Menurut Syamsi (2004:34-35) bahwa organisasi mempunyai kesamaan (sinonim) dengan beberapa hal seperti berikut ini :

- a) Institusi/lembaga, yaitu kelompok yang menampung aspirasi masyarakat, punya aturan tertulis atau tidak, tumbuh dalam masyarakat, mencapai tujuan bersama, dibentuk oleh pemerintah atau swasta.
- b) Birokrasi pemerintahan, administrasi dan manajemen, badan administrasi atau badan manajemen (*administrative body atau management body*), yaitu suatu badan yang menyelenggarakan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (baik dalam bidang pemerintahan maupun swasta) melalui sistem kerja yang berlandaskan suatu jaringan tata-hubungan kerjasama sesuai dengan tata aturan dan prosedur yang ditentukan.
- c) Organisasi formal, Organisasi yang memiliki struktur (bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi). Suatu organisasi harus memuat 4 unsur utama, yaitu: 1). Berorientasi Tujuan, 2). Sistem Hubungan Sosial, 3). Keaktifan Struktur, 4). Sistem Teknologi.
- d) Organisasi publik memiliki ciri-ciri: 1). Organisasi yang terbesar, 2). Mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan

ruanglingkup negara, 3). Mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan dan hukum secara terlembaga, 4). Mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, 5). Melayani keperluannya, 6). sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, 7). serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Atau satu-satunya organisasi di dunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak), membunuh rakyat dan memenjarakan rakyat.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi merupakan tata kerjasama sekelompok orang secara teratur dan berkelanjutan (*kontinue*) untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah ditentukan, dimana di dalamnya selalu terdapat tatacara dan hubungan antara atasan dan bawahan.

2.2.2 Bentuk-bentuk Organisasi

Ada beberapa bentuk organisasi sesuai dengan karakter dan cirinya masing-masing. Menurut Kassau (dalam Musanef, 2004:63) bahwa bentuk organisasi terdiri dari:

- a) Organisasi Garis, cirinya pimpinan tanpa staff pembantu dan adanya kesatuan komando, misalnya organisasi militer: kompi kebawah.
- b) Organisasi Staff/Fungsi, cirinya bawahan mendapat perintah dari beberapa pengawas yang bertanggungjawab kepada beberapa pengawas itu dalam bidangnya masing-masing, misalnya organisasi perusahaan.
- c) Organisasi Staff dan Garis, cirinya pimpinan dibantu staff dan adanya kesatuan komando, staff mempunyai wewenang fungsional bantuan teknis, petunjuk hanya pimpinan mempunyai wewenang komando, misalnya: pemerintahan dan sebagian organisasi militer.

- d) Organisasi Panitia, cirinya pimpinan berbentuk panitia terdiri dari beberapa orang, segala keputusan diambil dalam rapat dan dipertanggungjawabkan secara bersama, misalnya: kelompok kerja, panitia kerja atau langsung diberi nama Panitia.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi mempunyai 4 bentuk atau tipe Organisasi Garis yaitu adanya kesatuan komando, Organisasi Staff/Fungsi yaitu bawahan mendapat perintah dari beberapa pengawas yang bertanggungjawab kepada beberapa pengawas, Organisasi Staff dan Garis yaitu pimpinan dibantu staff dan adanya kesatuan komando, staff mempunyai wewenang fungsional bantuan teknis, petunjuk hanya pimpinan mempunyai wewenang komando, dan Organisasi Panitia yaitu pimpinan berbentuk panitia terdiri dari beberapa orang, segala keputusan diambil dalam rapat dan dipertanggungjawabkan secara bersama.

2.2.3. Ciri-ciri Organisasi yang Ideal.

Ciri-ciri organisasi ideal menurut Weber (dalam Sobirin, 2007:73) yaitu:

- a) Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan.
- b) Tujuan atau rencana organisasi terbagi dalam tugas-tugas. Ketentuan kewajiban dan tanggungjawab melekat pada jabatan, *job description* tentu saja merupakan salah satu metode untuk memenuhi karakteristik ini.
- c) Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. Weber menyebutnya kewenangan legal yaitu yang disahkan oleh kepercayaan akan supremasi hukum.

- d) Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis.
- e) Suatu sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas yang ditetapkan secara formal mengatur tindakan dan fungsi jabatan dalam organisasi.
- f) Prosedur dalam organisasi bersifat formal dan impersonal yakni peraturan-peraturan organisasi berlaku bagi setiap orang.

Weber dan Taylor (dalam Wayne, 2008:52) menyajikan teori organisasi dan manajemen dapat secara langsung dilacak keminat pengawasan secara fungsional. Secara bersama Weber dan Taylor membahas anatomi organisasi formal yang dapat disebut sebagai teori structural klasik. Pendekatan Taylor terhadap manajemen organisasi dilakukan dengan 5 unsur kunci yaitu :

- a) Pembagian kerja, menyangkut tentang bagaimana tugas, kewajiban dan pekerjaan organisasi didistribusikan. Dalam pengertian birokratik kewajiban perusahaan secara sistematis dibebankan kepada jabatan-jabatan dalam suatu tatanan spesialisasi menurun.
- b) Proses Skalar dan Fungsional, berkaitan dengan pertumbuhan vertikal dan horizontal organisasi. Proses scalar menunjukkan rantai perintah atau dimensi vertikal organisasi.
- c) Struktur, berkaitan dengan hubungan-hubungan logis antara berbagai fungsi dalam organisasi. Teori-teori klasik berfokus pada dua struktur dasar yang disebut dengan lini dan staf
- d) Rentang Pengawasan, menunjukkan jumlah bawahan yang berada di bawah pengawasan seorang atasan. Meskipun

sering dinyatakan bahwa jumlah bawahan yang dapat diawasi seorang manajer adalah lima atau enam orang dalam praktek rentang pengawasan tersebut bervariasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan ciri terdiri daripada dua orang atau lebih, ada kerjasama, ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain dan ada tujuan yang ingin dicapai.

2.3. Konsep Manajemen Pemerintahan

2.3.1. Pengertian Manajemen Pemerintahan

Pemerintahan pada dasarnya adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Salam, 2004:32).

Menurut Salam (2004:10) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Dengan demikian manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik

internal, eksternal, sarana, prasarana, alat, barang, maupun fungsi dan kedudukan dalam organisasi yang diatur dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara (Nurman, 2015:59). Menurut Budi Supriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tatakelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Suryadinata (2008:102) memandang manajemen pemerintah sebagai "suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan".

Taliziduhu Ndraha (2003:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya:

1. Asas dan sistem pemerintahan.
2. Hukum tata pemerintahan.
3. Ekologi Pemerintahan.
4. Filsafat dan Etika Pemerintahan.
5. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada pendapat lain, manajemen pemerintahan menurut Rasyid (2000:148) adalah manajemen yang diarahkan agar terlebih dahulu merumuskan hasil apa atau dengan kata lain tujuan apa yang di capai dengan uang, peralatan, keahlian dan tenaga kerja yang kemudian dilaksanakan. Selanjutnya hasil akan di evaluasi untuk menentukan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip seperti manajemen pada umumnya yaitu efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapai tujuan organisasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, dalam hubungan ke dalam, manajemen pemerintahan bertanggungjawab mengembangkan kemampuan staf yang serba bisa, membangun hubungan kerja vertical dan horizontal yang saling mendukung, serta menciptakan suasana kerja yang bergairah, sehingga kreativitas setiap aparat dapat dipacu dan pada gilirannya menjamin berlangsungnya inovasi yang terus menerus. Dalam hubungan keluar, manajemen pemerintahan bertanggungjawab membina kemampuan dan disiplin seluruh aparat untuk menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan yaitu: **Kesatu**, Pelayan (*Service*) yang akan membuahkan keadilan dalam

masyarakat. **Kedua**, Pemberdayaan (*empowerment*) yang akan mendorong kemandirian masyarakat. **Ketiga**, Pembangunan (*development*) yang akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Rasyid, 2000:149).

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.3.2. Fungsi Manajemen Pemerintahan

Menurut Supriyanto (2009 : 241), fungsi manajemen pemerintahan dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan

masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Manajemen pemerintah berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pimpinan negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi negara.
6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan anggaran secara berkala.
7. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
8. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
9. Menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan di bidang tata kelola pemerintahan.
10. Menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan.
11. Menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemerintahan.
12. Menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang menempati jabatan di bidang pemerintahan.
13. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi bidang tata kelola pemerintahan.

14. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara bidang tata kelola pemerintahan.
15. Penetapan standar pemberian ijin untuk investor yang akan menanamkan modalnya.
16. Pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara.
17. Penyelesaian perselisihan antar provinsi dibidang administrasi atau perbatasan daerah.
18. Penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan pengendalian bidang tata kelola pemerintahan.
19. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang tata kelola pemerintahan antar instansi.

Taliziduhu Ndraha (2003:160) ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

1. Perencanaan pemerintahan.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerinthan.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.
4. Kontrol pemerinthan.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan manajemen pemerintahan adalah sebagai suatu proses yaitu serangkaian tindakan, kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan negara, atau dengan kata lain manajemen pemerintahan merupakan cara

kerja organisasi pemerintahan yang meliputi seluruh kegiatan atau tindakan fungsi pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga atau institusi eksekutif.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan memiliki fungsi dasar terhadap kegiatan pemerintah atau kegiatan negara, dan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kegiatan warga negara khususnya dalam bidang administrasi, ekonomi/keuangan, sosial dan tata kelola pemerintahan.

2.3.3. Manajemen Pemerintahan Desa

Manajemen pemerintahan desa di Indonesia dilandasi oleh UUD 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berisikan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya dan juga pemanfaatan potensi desa dengan seoptimal mungkin.

Menurut Salam (2004:168) menyatakan manajemen pemerintah desa itu meliputi :

Di desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa yang disebut juga pemerintahan. Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa (atau yang disebut dengan nama lain) dan perangkat desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Manajemen pemerintahan desa memiliki tujuan untuk mewujudkan efektifitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam upaya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setempat sesuai dengan

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tujuan pembangunan nasional (Rauf & Maulidiah, 2015:87).

Disisi lain, penataan dan pengelolaan pemerintahan desa bertujuan untuk: 1). Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, 2). Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, 3). Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, 4). Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan 5). Meningkatkan daya saing desa (Rauf & Maulidiah, 2015:86).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pemerintahan desa adalah sebagai suatu proses yaitu serangkaian tindakan, kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.3.4. Keuangan dan Aset Desa

A. Keuangan dan Pendapatan Desa

Dalam rangka kelancaran proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, maka desa dan pemerintahan desa memerlukan keuangan desa dan aset desa sebagai pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

Menurut Nurcholis (dalam Rauf & Maulidiah 2015:225) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Bab VIII pasal 71 ayat 1 menjelaskan bahwa: (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, (2) hak dan kewajiban desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Nurcholis, 2011:81). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 dijelaskan tentang pendapatan desa yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut diatas, maka terkait dengan sumber pendapatan desa dalam undang-undang ini dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli desa terdiri dari, a). Hasil usaha desa, b). Hasil aset desa, c). Swadaya dan partisipasi masyarakat, d). gotong-royong, dan e). Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Selain seperti yang telah dijelaskan diatas, sumber pendapatan juga termasuk swadaya dan partisipasi masyarakat. Menurut Yadov (dalam Awang, 2006:69) membagi jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan
3. Partisipasi dalam berbagai manfaat dari pembangunan
4. Partisipasi dalam bentuk pengawasan dan evaluasi program serta proyek pembangunan

Menurut Saragi (2004:49), dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban. Pertukaran akan semakin sering bila pertukaran tersebut mengakibatkan pemenuhan hak seimbang dengan pelaksanaan kewajiban yang akan mempengaruhi frekuensi pertukaran sosial.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat baik sebagai kesatuan sistem, maupun sebagai kesatuan individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. (Josef, 2001:120).

Selanjutnya Sulaiman (dalam Awang, 2006:68) merumuskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut :

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara langsung dan tatap muka;
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dana dan sasaran;
3. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
4. Partisipasi dalam bentuk dukungan.

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa swadaya dan partisipasi masyarakat merupakan proses aktif, dimana dengan kerelaan

masyarakat turut menyumbang, mempengaruhi, memprakarsai serta membuat keputusan mengenai suatu proyek pembangunan.

Hasil gotong royong warga desa merupakan bagian dari sumber pendapatan asli desa yang mana dari hasil gotong royong tersebut dapat mendatangkan pendapatan bagi desa. Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah usaha lain yang diselenggarakan oleh suatu desa bersangkutan diluar dari apa yang tersebut di atas yang dijadikan sebagai pendapatan asli desa, misalnya pungutan desa, leges desa dan lain-lain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

B. Aset Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, juga memiliki aset sendiri yang disebut “aset desa”. Aset desa merupakan kekayaan yang dimiliki desa, salah satu yang membedakan desa dengan kelurahan adalah “kekayaan desa” (Rauf & Maulidiah, 2015:237).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Bab II, Pasal 2), terdiri dari :

- 1) Jenis kekayaan desa terdiri atas :
 - a. Tanah kas desa,
 - b. Pasar desa,
 - c. Pasar hewan,
 - d. Tambatan perahu,
 - e. Bangunan desa,
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola desa dan,
 - g. Lain-lain kekayaan milik desa.
- 2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/daerah,
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga,

- c. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis,
- d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/kontrak dan lain-lain,
- e. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
- f. Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah.
- g. Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
- h. Hibah pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat, dan
- i. Hasil kerja sama desa.

Sementara itu menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa, pada pasal 18 menjelaskan bahwa pendapatan desa, terdiri atas :

- 1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli desa yang meliputi :
 1. Hasil usaha desa
 2. Hasil kekayaan desa
 3. Hasil swadaya dan partisipasi
 4. Hasil gotong royong, dan
 5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa,
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa,
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan,
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

- 2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- 3) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

2.3.5. Pengelolaan Potensi Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi mempunyai arti: daya, kesanggupan, kekuatan atau kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologi pengelolaan tersebut berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai suatu tujuan.

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan (2007:5) pengelolaan sama dengan manajemen yaitu: penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pradjudi (dalam Rahardjo, 2011:21) bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sektor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian tujuan kerja tertentu. Pengelolaan menurut Moekijat (dalam Rahardjo, 2011:21) adalah

rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Sedangkan menurut Chabib (2010:132) bahwa pengelolaan diartikan sebagai berikut : 1). Proses, cara, perbuatan mengelola, 2). Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, 3). Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan 4). Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Widjaja (2003:104) potensi desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan, mengembangkan potensi-potensi desa/marga menjadi usaha-usaha desa/marga maupun kegiatan perorangan guna meningkatkan pendapatan asli desa/marga atau kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan potensi desa merupakan suatu bagian dari pengelolaan keuangan desa yang mana potensi desa merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan potensi yang ada di desa setidaknya harus melampaui beberapa rangkaian atau tahapan, yaitu: 1). Tahap perencanaan, 2). Tahap pemanfaatan atau penggunaan, 3). Tahap pemeliharaan, 4). Tahap penatausahaan, 5). Tahap pembinaan, dan 6). Tahap pengendalian atau pembinaan.

Dari batasan-batasan diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan potensi desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 8 ayat 3 huruf e menjelaskan bahwa desa memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung. Pengelolaan potensi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas, dapat dipahami bahwa desa memiliki potensi di tiga sektor. Maka dari itu, pemerintah desa diharapkan mampu mengelolah potensi tersebut.

A. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan terjemahan dari "*Human Resources*", namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan "*manpower*" (tenaga kerja). Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personil (personalia, kepegawaian, dan sebagainya).

Menurut Sutrisno (2009:1), SDM merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya.

Werther dan Davis (dalam Sutrisno, 2009:1) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai

tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.

Menurut Ndraha (dalam Sutrisno, 2009:2), sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: skil/kompetensi, kecerdasan, kreatif, inovatif, berpandangan kemasa depan, berwawasan tinggi, partisipatif, kerjasama dan tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, tenaga otot dan sebagainya.

Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik dan benar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam suatu organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam organisasi ataupun perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Menurut Sutrisno (2009:2), dengan berpegang pada definisi tersebut diatas, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (*power*). Pendapat tersebut relevan dalam kerangka berpikir bahwa agar menjadi sebuah kekuatan, sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh alam, baik di darat, laut maupun udara dan memiliki nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1). Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, seperti: hutan, hasil laut, hasil perkebunan dan sungai serta hasil pertanian dan 2). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti: sungai, laut, udara, minyak, timah, emas, gas alam dan lain-lain. Kemudian berdasarkan lokasinya, sumber daya alam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1). Sumber daya alam darat, seperti: hutan, tanah, pegunungan, perbukitan, lahan pertanian dan perkebunan serta lembah, lokasi wisata darat seperti taman kota/desa, dan 2). Sumber daya alam perairan, seperti: waduk, tambak ikan, keramba, sungai, tambatan perahu atau dermaga, danau, arus jram dan laut (<http://blog.ruangguru.com>)

C. Potensi Sumber Daya Ekonomi

Sumber Daya Ekonomi adalah segala sumber daya yang dimiliki berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu yang berasal dari sumber daya alam (SDA)

maupun dari sumber daya manusia (SDM) yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan (*benefit*), serta dapat diolah sebagai modal dasar dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya ekonomi merupakan salah satu bentuk dari sumber daya konsumen, contohnya: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya kewirausahaan.

Menurut Mulyani (2009:89), sumber daya modal merupakan segala hal yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Modal dapat kita bagi menjadi beberapa macam yakni:

1. Modal Menurut Pemiliknya
 - a) Modal perseorangan merupakan modal milik perorangan/individu. misalnya: kendaraan.
 - b) Modal masyarakat merupakan modal milik banyak orang dan untuk kepentingan bersama. misalnya: pelabuhan, jalan.
2. Modal Menurut Wujudnya
 - a) Modal konkret merupakan modal yang jelas wujudnya dan bisa dilihat. misalnya: gedung, komputer, kantor.
 - b) Modal abstrak merupakan modal yang tidak dapat dilihat tetapi jelas manfaatnya. misalnya: keterampilan, kreativitas.
3. Modal Menurut Bentuknya
 - a) Uang merupakan modal dalam bentuk dana.
 - b) Barang merupakan modal alat untuk mendukung sebuah industri. misalnya: mesin jahit, komputer, gilingan beras.
4. Modal Menurut Sifatnya
 - a) Modal tetap merupakan modal yang dapat digunakan dalam berulang kali dalam sebuah proses industri. misalnya: mesin.

- b) Modal lancar merupakan modal yang habis dalam satu kali proses produksi. misalnya: bahan baku, bahan bakar, kertas.

5. Modal Menurut Sumbernya

- a) Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan. misalnya: tabungan.
- b) Modal pinjaman merupakan modal yang berasal dari pinjaman pihak lain. misalnya: hutang bank.
- c) Modal hibah merupakan modal yang berasal dari pemberian orang lain. misalnya: bantuan hibah pemerintah ke UKM.

2.4. Konsep Pembangunan

2.4.1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang berada dalam batas-batas wilayah tertentu (Tjokrowinoto, 2007:35).

Sedangkan pembangunan menurut Ndraha adalah meninggikan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri dari masyarakat desa serta asas permufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama (Ndraha, 2001:110).

Dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya suatu usaha dan proses, menurut Siagian (2005:12) pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu

masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Usaha atau proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara adalah tekad atau keinginan yang disusun berdasarkan pemikiran–pemikiran dan pertimbangan–pertimbangan secara luas. Usaha atau proses pembangunan terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan–arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Demi terwujudnya pembangunan yang berjalan dengan baik dalam suatu desa, diperlukannya partisipasi dari masyarakat agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar, menurut Siagian (2005:20) ada 5 ide pokok pembangunan yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang tanpa akhir (*never ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dan seperti dimaklumi

merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tututan situasi yang berbeda dari suatu jangka ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.
5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain cara hidup yang baru akan lebih dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan “cara hidup gaya barat”. Setiap bangsa negara yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh.

Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya, pembangunan menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, pembangunan bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Melainkan

pembangunan tergantung dari proses emasipasi diri, dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan.

2.4.2. Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan suatu kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Menurut Sufian (2003:35) mengatakan ada dua kelompok perilaku dalam pembangunan, yaitu: pemerintah dan masyarakat. Kedua perilaku pembangunan ini adalah sama-sama penting dalam memberikan akses bagi pembangunan.

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik (Fakih, 2011:66). Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah yang berwenang untuk memperbaiki perekonomian, sosial, dan budaya masyarakat untuk mengintegrasikan masyarakat kedalam kehidupan negara dan untuk membuat menjadi mungkin bagi masyarakat dalam memberikan kontribusi secara penuh untuk kemajuan nasional. Karena pembangunan merupakan suatu proses atau kegiatan maka hal tersebut tidak lepas dari administrasinya yang disebut administrasi pembangunan.

Peningkatan pertumbuhan pendapatan nasional ternyata tidak menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan nasional dan harapan. Bahkan belum bisa mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Mengingat paradigma pertumbuhan telah menimbulkan ketimpangan yang lebih besar, maka diterapkan alternatif lain, yakni konsep pembangunan dengan paradigma

pertumbuhan dan pemerataan. Hasil konsep yang disebut belakangan termanifestasikan dalam perbaikan sosial ekonomi masyarakat, meskipun dikhawatirkan terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang mengancam kelangsungan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pendekatan konsep pembangunan manusia (Fakih, 2011:99).

Kegagalan orientasi pembangunan yang berparadigma pada pertumbuhan dan pemerataan, selain karena lebih menekankan pendekatan “*Human Development*” juga karena lebih menekankan model pembangunan kebutuhan dasar manusia (*basic needs strategy*). Kebutuhan dasar manusia mempunyai tingkatan berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, hubungan sosial, harga diri dan aktualisasi diri.

Menurut Ndraha (2001:64), ada 5 masalah yang dihadapi dalam pembangunan masyarakat desa di dalam praktek, antara lain :

1. Terdapat kecenderungan hanya kaum elit komunitas saja yang mampu dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.
2. Sampai sejauh ini pembangunan masyarakat belum berhasil sepenuhnya dalam usahanya mendorong perubahan sosial. Memang terdapat perubahan, tetapi jarang sekali terjadi perubahan yang mendasar.
3. Dewasa ini pembangunan masyarakat lebih berbau politik, artinya pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik atau simbol politik.

4. Semakin besar komunitas semakin bervariasi kepentingannya, sehingga terdapat kepentingan yang saling bersaing atau kompetitif.
5. Pembangunan masyarakat cenderung hanya kepentingan yang sangat umum sifatnya yang diperhatikan, sementara kepentingan lapisan dan kelompok masyarakat di dalam komunitas terabaikan atau tersisihkan.

Dalam melakukan pembangunan maka masyarakat haruslah dipandang sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan pembangunan yang lebih penting bukan bagaimana hasilnya secara material, melainkan bagaimana prosesnya sehingga hasil tadi diperoleh, apakah sudah melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan atau tidak.

Agar pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruanglingkup pengembangannya, ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita yaitu:

1. Prinsip pembangunan pedesaan, yaitu pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip berikut ini: 1). Transparansi, 2). Partisipatif, 3). Dapat dinikmati masyarakat, 4). Dapat dipertanggungjawabkan, dan 5). Berkelanjutan.
2. Sasaran pembangunan pedesaan merupakan suatu langkah kongkrit dan nyata yang mesti dilakukan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari pembangunan itu sendiri. Tujuan dari pembangunan tidak mungkin bisa diraih kalau sasarannya tidak jelas dan tidak tepat. Makanya, dalam pembangunan pedesaan yang mesti perlu diperhatikan adalah ketepatan

sasaran, agar pembangunan yang dilaksanakan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.

3. Ruanglingkup pembangunan adalah unsur-unsur yang terlibat dalam pembangunan, yaitu: 1) Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Desa sebagai unsur yang punya kewenangan dan kewajiban dalam merancang serta melaksanakan pembangunan, 2) Lembaga Kemasyarakatan sebagai unsur yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan, dan 3) Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri (Fakih, 2011:73).

2.4.3. Asas-asas Pembangunan Desa.

Menurut Fakih (2011:36) pembangunan desa dapat dilakukan berdasarkan 3 asas pembangunan yaitu:

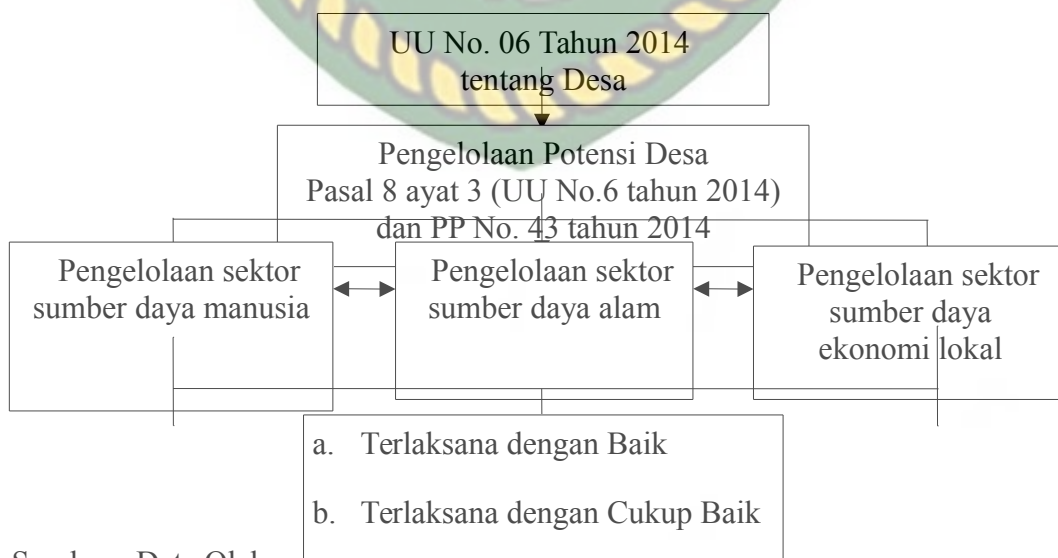
1. Asas Pembangunan Integral yaitu: pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa, seperti: pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa titik berat yang harus dilakukan adalah pembangunan perekonomian kerakyatan.
2. Asas Kekuatan Sendiri ialah proses yang paling pertama dari tiap-tiap usaha dengan mendasarkan kekuatan dan kemampuan desa sendiri dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.
3. Asas Permufakatan Bersama, diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan dan kondisi yang benar-benar

dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedangkan putusan untuk melaksanakan proyek itu bukan berdasarkan atas perintah atasan, melainkan merupakan putusan bersama anggota masyarakat desa.

2.5. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka pemikiran adalah untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang variabel penelitian dan indikator-indikatornya. Kerangka pemikiran berguna sebagai konsep dalam menganalisa variabel penelitian. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian tentang Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran Tentang Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar



Sumber : Data Olahan Penulis, 2018

2.6. Konsep Operasional, Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran

2.6.1. Konsep Operasional

Untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti atau untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti (Arikunto, 2016: 112), maka dalam hal ini peneliti mengemukakan defenisi konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan.
2. Potensi desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi desa menjadi usaha-usaha desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengelolaan potensi desa adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Pembangunan adalah proses perubahan suatu kondisi ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.
5. Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah untuk memperbaiki perekonomian, sosial budaya masyarakat.

2.6.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk mengetahui serta menganalisis Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka masing-masing variabel yang digunakan akan dioperasionalkan dengan bentuk pentabelan seperti berikut:

Tabel II.1 :
Operasionalisasi Variabel tentang Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Penilaian
Pengelolaan potensi desa dalam pembangunan desa merupakan proses merencanakan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan anggota organisasi dalam menggali dan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Zulkifli, 2005 : 28)	Pengelolaan potensi desa	Pengelolaan Potensi sumber daya manusia	1. Kompetensi/skill 2. Kreativitas 3. Kewirausahaan 4. Inovatif 5. Gotong Royong 6. Partisipatif 7. Kerjasama	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		Pengelolaan Potensi sumber daya alam	1. Pembinaan petani karet 2. Pembinaan petani sawit 3. Pemanfaatan lahan tidur/kosong 4. Pelestarian wisata arum jeram 5. Pemanfaatan sungai untuk keramba 6. Pemanfaatan sungai untuk objek wisata 7. Tambang galian C 8. Wisata kawasan hutan	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		Pengelolaan Potensi sumber ekonomi lainnya	1. Pengelolaan pasar desa 2. Pengelolaan tambak/perahu/dermaga 3. Pengelolaan tempat pelelangan ikan 4. Pembinaan kewirausahaan/Usaha Kecil Masyarakat	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2018

2.6.3. Pengukuran

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden terhadap pengelolaan potensi desa dalam pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu, maka peneliti perlu membuat teknik pengukuran yang bertujuan untuk menemukan penilaian responden terhadap setiap indikator penelitian yang terdapat dalam variabel yang akan peneliti nilai. Seluruh indikator dan item yang akan dinilai dalam pengelolaan potensi desa terhadap pembangunan Desa Gema telah peneliti jelaskan pada tabel II.1 di atas.

Untuk mengetahui hasil pengukuran dari seluruh jawaban responden, maka peneliti membuat 3 (tiga) range alternatif pilihan jawaban dengan interval sebagai berikut:

- Kurang Baik : apabila tingkat persentase yang diperoleh dari jawaban responden memiliki interval 0 – 33%.
- Cukup Baik : apabila tingkat persentase yang diperoleh dari jawaban responden memiliki interval 34 – 66%
- Baik : apabila tingkat persentase yang diperoleh dari jawaban responden memiliki interval 67 – 100%

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti perlu menentukan satu jenis penelitian yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kuantitatif (Arifin, 2012:29). Sedangkan cara kerjanya yaitu dengan cara mengumpulkan data penelitian dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada sampel, kemudian dibuat dalam bentuk data tabel yang selanjutnya akan dijelaskan data-data tabel tersebut secara analisis kuantitatif (Prasetyo & Jannah, 2014:143).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian (Nawawi 2005:6).

Berdasarkan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*Mixed Method Research*). Tujuan pendekatan *Mixed Method Research* yaitu untuk memperpadukan dan mengkombinasikan antara data yang berbentuk kualitatif dan data yang berbentuk

kuantitatif agar mampu menghasilkan hasil penelitian yang akurat (Sumadinata, 2005:72).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dengan perkiraan waktu penelitian 6 bulan yang dimulai dari bulan Juni sampai November 2018. Adapun pertimbangan penulis adalah adanya rasa ingin tau untuk melihat sejauh mana pengelolaan potensi desa untuk pembiayaan pembangunan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ini berjalan sebagai mana mestinya.

Selain itu adalah karena Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga desa termasuk didalam pengelolaan potensi desa agar bisa memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan desa dan juga kesejahteraan bagi masyarakat desa. Pertimbangan lain yang mendorong penulis melakukan penelitian di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar adalah karena Desa Gema merupakan pusat dari Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yang ditandai dengan berdirinya kantor Camat Kampar Kiri Hulu di Desa Gema.

Selain tata letak wilayah desa yang relatif strategis, yang juga dilayani oleh ketersediaan prasarana transportasi jalan dan sungai. Desa Gema juga memiliki karakteristik kegiatan bisnis, sosial, ekonomi, dan perdagangan yang relatif kompleks, terutama dengan potensi alam yang sangat subur bagi pertanian dan perkebunan, sehingga cukup layak dan potensial untuk diposisikan sebagai konsentrasi penelitian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari unsur pelaksana

Pemerintahan Kecamatan, bahwa Desa Gema memiliki ketersediaan informasi dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh data dan komponen yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruanglingkup dan waktu yang telah ditentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data bukan semata-mata faktor manusianya yang dijadikan sebagai parameter populasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki nilai dan makna serta karakteristik tersendiri yang dianggap bisa mewakili gambaran utuh dari populasi (Sumadinata, 2010:116).

Adapun populasi dari kalangan pemerintahan desa gema yang peneliti jadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Kaur Desa 4 orang, Kepala Dusun 4 orang, dan anggota BPD 9 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Populasi dan Sampel Aparatur Pemerintahan Desa Gema

No	Unsur Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa	1	1
2	Sekretaris Desa	1	1
3	Kaur Desa	4	1
4	Kepala Dusun	4	4
5	Anggota BPD	9	1
Jumlah		19	8
Persentase		100%	42,1%

Sumber: data peneliti 2018

Sedangkan untuk masyarakat dari Desa Gema ada 440 KK dan akan diambil sebagai Informan sebanyak 40 KK dari 440 KK yang tersedia di Desa

Gema, yang akan diambil per Dusun, yaitu Dusun I 10 orang, Dusun II 10 orang, Dusun III 10 orang dan Dusun IV 10 orang.

Adapun populasi dan sampel yang di jadikan sebagai uji pembuktian data untuk masyarakat Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2
Populasi dan Sampel Masyarakat Desa Gema

No	Masyarakat	Populasi	Sampel
1	Dusun I	140	10
2	Dusun II	100	10
3	Dusun III	90	10
4	Dusun IV	110	10
Jumlah		440	40
Persentase		100%	11%

Sumber: data peneliti 2018

3.4. Teknik Penentuan Informan dan Responden

3.4.1. Teknik Penentuan Informan

Informan yaitu orang yang memberikan informasi secara partisipatif dan memiliki keterkaitan erat tentang topik penelitian. Adapun informan inti dalam penelitian ini adalah: 1). Kepala Desa Gema, 2). Sekretaris Desa, 3). Kaur Pembangunan, 4). Kepala Dusun I, II, III dan IV, dan 5). Ketua BPD Gema.

Penentuan informan penelitian berdasarkan pendekatan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* menurut Sugiono (2007:57) yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Pertimbangan tertentu ini menurut Sugiono (2007:58) bahwa orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa

sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

3.4.2. Teknik Penentuan Responden

Responden adalah subjek atau orang yang mau memberikan respon atau jawaban terhadap kuisisioner yang diajukan oleh seorang peneliti. Responden dalam penelitian ini sebanyak 40 KK dari 440 KK yang ada di Desa Gema, yang akan diambil per Dusun, yaitu Dusun I 10 orang, Dusun II 10 orang, Dusun III 10 orang dan Dusun IV 10 orang. Untuk memudahkan penelitian ini, maka teknik penarikan/penentuan sampel dari responden penelitian yaitu teknik *Random Sampling*. *Random sampling* yaitu suatu teknik/cara dalam menarik sampel penelitian dengan sistem acak tanpa ada kriteria tertentu dalam pengambilannya. Cara kerjanya yaitu dengan mengajukan hal dan pertanyaan yang sama kepada seluruh sampel dengan tujuan mendapatkan jawaban yang pasti terhadap objek penelitian (Arikunto, 2006:145).

3.5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang peneliti gunakan, yaitu: data primer dan data sekunder yang terdiri :

- a. Data Primer. Data Primer yaitu data kongkrit yang bersumber atau diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu Pemerintahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Data tersebut bisa berupa: dokumen-dokumen tentang pembangunan desa, profil desa, Struktur desa atau kelembagaan yang ada di Desa Gema dan dokumen-dokumen atau data-data lain tentang pengelolaan potensi Desa Gema dalam pembangunan desa.

- b. Data Sekunder adalah data pendukung yang memberi penjelasan mengenai data primer dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, buku, jurnal, koran, internet atau karya tulis yang relevan dengan tema penelitian guna mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

2.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara (*interview*), yaitu alat pengumpulan data melalui suatu proses interaksi dan komunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden terhadap objek yang menjadi topik dalam penelitian.
2. Kuisisioner yaitu membagikan sejumlah daftar pertanyaan (angket) kepada responden untuk menggali informasi tentang objek penelitian.
3. Kajian Literatur, dengan maksud mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian agar memperoleh keterangan, teori dan informasi yang jelas sebagai pendukung dari objek yang diteliti.
4. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti dengan cara melihat langsung kelapangan.

3.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk narasi, dimana hasil pengumpulan data direduksi, dirangkum hingga menemukan tema-tema dan pokok-pokok yang dianggap relevan. Data yang direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih tajam, hal ini penting mengingat banyaknya data yang diperoleh pada saat pengamatan dilapangan maupun dipustaka. Untuk menghindari kekeliruan penelitian diupayakan tersusun secara sistematis. Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dan selanjutnya dijadikan bahan dalam membuat suatu kesimpulan.

Setelah data-data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan terhadap data-data tersebut. Metode pembahasan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Metode Analistik Kuantitatif*. Metode Diskriptif Analistik merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dengan metode ini, selanjutnya data yang telah terkumpul diproses, disusun dan kemudian dianalisa yang selanjutnya di interpretasikan (Sumadinata, 2010:96).

Jadi, secara keseluruhan analisis data dilakukan dengan 3 metode yaitu :

1. Reduksi Data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Display data (penyajian data) merupakan penyajian dan pemaparan data dari hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti mengembangkan sebuah deskripsi (penggambaran dan penjabaran) informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validitas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Lahirnya Desa Gema

Pada zaman dahulu sebelum Indonesia Merdeka terdapat sebuah Kampung bernama Pasir Ramo yang terletak disebuah bukit yang sempit dimana tempat tersebut dijadikan orang Pribumi pada saat itu sebagai tempat persembunyian dan pelarian pada masa Kolonial, seiring dengan bergantinya waktu penduduk semakin bertambah dan tidak memungkinkan lagi untuk penduduk membangun perumahan di kampung tersebut, ditambah lagi sulitnya mendapatkan air untuk semua keperluan, sedangkan untuk mandi saja masyarakat pada saat itu harus berjalan kaki sekitar 40 menit menuju sungai Kampar kiri.

Pada tahun 1944 kondisi sudah mulai agak aman dan keadaan semakin hari perkampungan semakin sempit dan kebutuhan air semakin sulit mulailah beberapa orang penduduk berinisiatif membangun rumah di pinggiran Sungai Kampar kiri, karna lokasinya dekat sungai dan memiliki datararn yang cukup luas sangat menjanjikan untuk kehidupan yang lebih baik, maka penduduk yang masih tinggal di kampung Pasir Ramo mulai pindah dan membangun perumahan di pinggiran sungai tersebut. Sehingga pada Tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, maka kampung baru ditepi Sungai Kampar kiri tersebut diberi nama GEMA, yang merupakan singkatan dari Gelora Empat Lima .

4.2. Keadaan Geografis

Desa Gema merupakan salah satu dari 20 Desa dan Kelurahan yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dimana kantor Camat Kampar Kiri Hulu berada di Desa Gema. Jarak pusat Pemerintahan Desa Gema dengan Ibukota Kabupaten yaitu 73 Km sedangkan jarak dengan Ibukota Provinsi yaitu 85 Km (sumber: *Data Statistik Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu 2017*). Adapun batas-batas wilayah Desa Gema adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur dengan : Kecamatan Kampar Kiri
- Sebelah Selatan dengan : Desa Tanjung Belit Selatan
- Sebelah Barat dengan : Desa Tanjung Belit

Luas Wilayah sebesar 23,12 Km (2312 Ha) yang terdiri dari :

- Tanah Perkebunan : 603 Ha
- Tanah Pekarangan : 312 Ha
- Tanah Tegalan : 292 Ha
- Lain-Lain : 1.105 Ha

Secara fisik, Desa Gema yang terletak di kecamatan Kampar Kiri Hulu ini pada umumnya mempunyai relief tanah yang datar yang juga merupakan daerah dataran rendah. Desa Gema juga dilalui oleh sebuah sungai yang disebut dengan sungai Kampar Kiri.

Dilihat dari keadaan iklimnya, kondisi iklim yang terjadi di Desa Gema sama halnya dengan iklim yang terjadi di desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia yaitu yang sama-sama mempunyai iklim yang tropis yaitu dimana musim kemarau dan penghujan yang sangat berpengaruh dan mempengaruhi langsung terhadap sistem pertanian dan perekonomian masyarakat Desa Gema.

4.3. Keadaan Demografis

Keadaan penduduk merupakan suatu hal yang cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa. Jumlah penduduk yang dimiliki suatu desa akan menggambarkan potensi sumber daya manusia. Penduduk dapat dikatakan faktor penting untuk menentukan gerak langkah pembangunan nasional maupun pembangunan desa, karena penduduk disamping subjek dalam pembangunan juga sekaligus sebagai objek dalam pembangunan. Masalah kependudukan yang penyebarannya kurang merata juga akan mempengaruhi usaha-usaha Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kepentingan masyarakat.

Untuk melihat lebih jelas jumlah penduduk Desa Gema menurut jenis kelaminnya pada tahun 2018, berikut ini akan diuraikan jumlah penduduk Desa Gema menurut jenis kelaminnya seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Desa Gema Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	570	49,6%
2	Perempuan	630	50,4%
	Jumlah	1200	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Gema berjumlah sebesar 1.200 jiwa pada tahun 2018 yang terdiri dari 570 laki-laki atau 49,6% dan 630 perempuan atau 50,4% dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 440 kepala keluarga (KK). Jumlah diatas menunjukkan bahwa jumlah Perempuan lebih banyak daripada jumlah Laki-laki.

Selain dilihat dari jenis kelaminnya, berikut ini juga akan diuraikan keadaan penduduk Desa Gema menurut tingkat umur pada tahun 2018. Kelompok umur adalah golongan usia dari masyarakat dimana tempat lokasi penelitian ini

dilakukan yakni di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Desa Gema Menurut Umur Tahun 2018

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0-5	100	9,6%
2	6-10	110	10%
3	11-20	235	19,7%
4	21-30	327	22,7%
5	31-40	213	16,9%
6	41-50	125	12,1%
7	51-keatas	90	9%
	Jumlah	1200	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Tabel IV.2 diatas menunjukkan jumlah penduduk Desa Gema menurut umur pada tahun 2018. Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah penduduk desa Gema yang mempunyai angka tertinggi berada pada rentang umur 21-30 tahun yaitu sebesar 327 jiwa atau 22,7%.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia dewasa sangat besar. Sedangkan untuk angka terendah adalah penduduk yang berumur 51 tahun keatas yaitu sebesar 95 jiwa atau 9%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia tua sangat kecil.

4.4. Sosial, Budaya dan Ekonomi

4.4.1. Pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital, karena pendidikan suatu penduduk juga menentukan maju mundurnya suatu daerah. Pendidikan disisi lain merupakan faktor yang paling penting dalam pembangunan dan peningkatan wawasan bagi masyarakat sehingga diperlukan sarana pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Dalam hal ini sarana pendidikan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Gema

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2
2	TK	1
3	SD	2
4	PDTA/MDA	2
5	SLTP	1
6	SLTA	1
7	Pondok Pesantren	-
	Jumlah	9

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Berdasarkan tabel IV.3 diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang tersedia dalam wilayah Desa Gema belum begitu lengkap karena sarana pendidikan yang belum memadai untuk masyarakat serta belum adanya sarana Pondok Pasentren, jadi bagi murid SD yang ingin melanjutkan pendidikan nya ke Pasentren mereka harus melanjutkannya ketempat lain karena keterbatasan sarana tersebut.

Tingkat pendidikan penduduk sedikit banyaknya juga ikut mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa. Semakin maju pendidikan, ini berarti akan member dan membawa kemajuan diberbagai bidang kehidupan.

Berikut ini akan diuraikan tingkat pendidikan penduduk Desa Gema pada tahun 2018 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4
Jumlah Penduduk Desa Gema Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkatan Pendidikan (Usia)	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	3-6 tahun yang belum masuk TK	35	45	80	8,19%
2	3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	18	25	43	1,10%
3	7-8 tahun yang tidak pernah sekolah	4	8	12	0,34%
4	7-8 tahun yang sedang sekolah	85	90	175	49,22%
5	18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	3	6	9	0,37%
6	18-56 tahun yang pernah sekolah tapi tidak tamat	22	20	42	3,12%
7	Tamat SD/Sederajat	131	140	271	14,96%
8	12-56 tahun tidak tamat SLTP	10	15	25	1,97%
9	18-56 tahun tidak tamat SLTA	26	20	46	1,84%
10	Tamat SLTP/Sederajat	80	90	170	5,25%
11	Tamat SLTA/Sederajat	110	123	233	5,96%
12	Tamat D1/Sederajat	6	10	16	0,60%
13	Tamat D2/Sederajat	8	11	19	0,92%
14	Tamat D3/Sederajat	10	15	25	2,52%
15	Tamat S1/Sederajat	17	10	27	3,31%
16	Tamat S2/Sederajat	4	2	6	0,29%
17	Tamat S3/Sederajat	1	-	1	0,03%
	Jumlah	570	630	1200	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Gema telah mengalami kemajuan dibidang pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari penduduk usia 7-8 tahun yang sedang bersekolah mencapai 175 jiwa atau 49,22%, penduduk yang tamat SD mencapai 271 jiwa atau 14,96%, tamat SLTP

mencapai 170 jiwa atau 5,25%, tamat SLTA mencapai 233 jiwa atau 5,96%, tamat Perguruan Tinggi Akademi (D1-D3) mencapai 60 jiwa atau 4,04%, dan tamat S1-S3 mencapai 34 jiwa atau 3,62%. Sementara yang tidak tamat SLTP hanya sebanyak 25 jiwa atau 1,97% dan yang tidak tamat SLTA hanya sebanyak 46 jiwa atau 1,84%.

Tingkat pendidikan ini banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa. Hal ini tentu sangat membutuhkan segenap dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembangunan tersebut. Proses pembangunan yang sedang berjalan akan dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusia yang diperlukan terpenuhi.

4.4.2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah jenis-jenis pekerjaan dari masyarakat dimana tempat lokasi penelitian ini dilakukan. Jenis pekerjaan penduduk Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sangat beragam, namun didominasi oleh para Petani. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Buruh, Peternak, Pengusaha Kecil dan Menengah, Pensiunan PNS/TNI/POLRI dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Gema berdasarkan mata pencahariannya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5
Jumlah Penduduk Desa Gema Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	Petani	257	288	545	70,46
2	Buruh	70	20	90	16,73

3	Pegawai Negeri Sipil	14	15	29	2,73
4	Pegawai Honorer	4	1	5	0,16
5	Pengrajin Industri Rumah Tangga	1	6	7	0,62
6	Peternak	10	15	25	6,21
7	Nelayan	5	-	5	0,21
8	Montir	4	-	4	0,25
9	Dokter Swasta	2	1	3	0,12
10	Perawat Swasta	-	5	5	0,21
11	Pembantu Rumah Tangga	-	2	2	0,08
12	POLRI	3	-	3	0,16
13	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	9	4	13	1,16
14	Pengusaha Kecil dan Menengah	5	3	8	0,33
15	Dukun Kampung Terlatih	1	3	4	0,25
16	Jasa Pengobatan Alternatif	3	2	5	0,21
17	Karyawan Perusahaan Swasta	2	-	2	0,08
	Jumlah	390	365	755	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Berdasarkan tabel IV.5 diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Gema paling besar adalah Petani yakni mencapai 545 jiwa atau 70,46%, sedangkan mata pencaharian penduduk yang terkecil adalah dibidang Pembantu Rumah Tangga sekitar 2 jiwa atau 0,08% dan Karyawan Perusahaan Swasta sekitar 2 jiwa atau 0,08%.

4.4.3. Agama

Masyarakat di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berjumlah 1200 jiwa dan mayoritas beragama Islam. Adapun jumlah rumah ibadah yang ada di Desa Gema untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6
Jumlah Rumah Ibadah di Desa Gema

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Mushollah	2
	Jumlah	4

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Dari tabel IV.6 diatas dapat dilihat jumlah rumah ibadah bagi masyarakat di Desa Gema. Adapun jumlah rumah ibadah tersebut berupa mesjid 2 buah dan mushollah 2 buah. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk Desa Gema semuanya beragama Islam.

4.4.4. Kesehatan

Kesehatan adalah bagian penting dalam pembangunan. Seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, apabila tubuhnya dalam keadaan sehat. Disamping itu juga masalah kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Kesehatan merupakan suatu hal yang prinsip bagi setiap orang termasuk juga bagi masyarakat yang ada di Desa Gema.

Untuk menampung masalah kesehatan di Desa Gema maka fasilitas kesehatan yang tersedia di Desa Gema adalah 1 buah puskesmas dan 2 buah posyandu, yang mana puskesmas tersebut aktif dalam masyarakat.

4.5. Organisasi Pemerintahan Desa

Dari Data Statistik Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu, wilayah Desa Gema terbagi atas 4 (empat) Dusun, 8 (Delapan) Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT). Unsur Pemerintahan Desa Gema sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku terdiri dari : aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa Gema dipilih oleh warga desa melalui proses pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan para Kepala Dusun yang keseluruhannya berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Bentuk Struktur Organisasi Pemerintah yang dimiliki Desa Gema dilandasi dan mengacu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan perangkat lainnya. Dalam membantu tugas Kepala Desa maka Kepala Urusan terbagi :

- a. Kepala Urusan Pemerintahan,
- b. Kepala Urusan Pembangunan,
- c. Kepala Urusan Umum, dan
- d. Kepala Urusan Keuangan

Struktur organisasi sangat erat kaitannya dengan organisasi itu sendiri secara keseluruhan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin atau Kepala Struktur Organisasi harus dapat menyusun struktur dengan baik.

PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa menyebutkan Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, menyelenggarakan urusan pembangunan dan menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Dalam kaitan ini, Desa Gema Organisasi dan anggota Kelembagaan Desa yang cukup padat, sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.7
Struktur Organisasi dan Kelembagaan

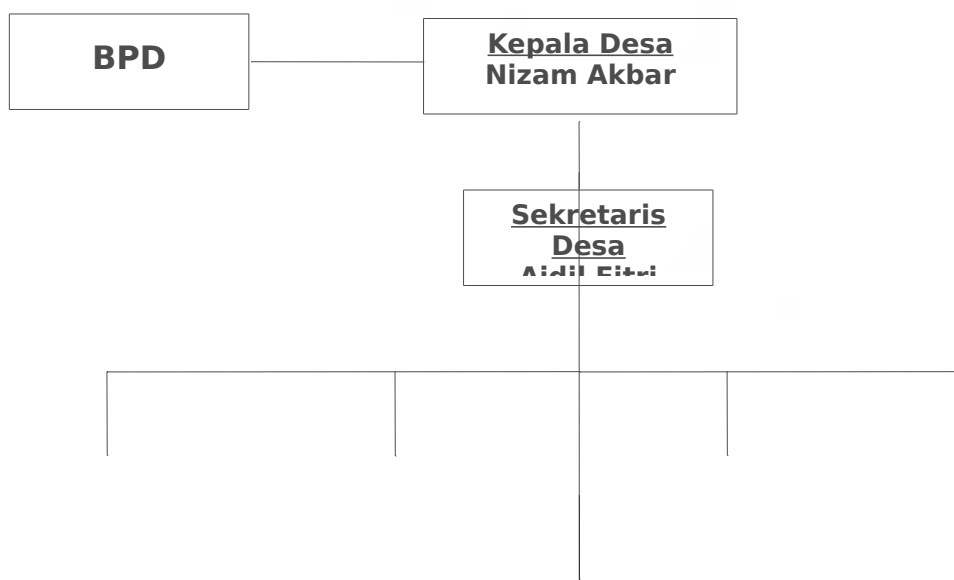
No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	9 orang
2.	Kepala Desa	1 orang
3.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	11 orang
4.	Sekretaris Desa	1 orang
5.	Perangkat Desa	4 orang
6.	Kepala Dusun	4 orang
7.	Rukun Warga (RW)	8 orang
8.	Rukun Tetangga	16 orang
Jumlah		54 orang

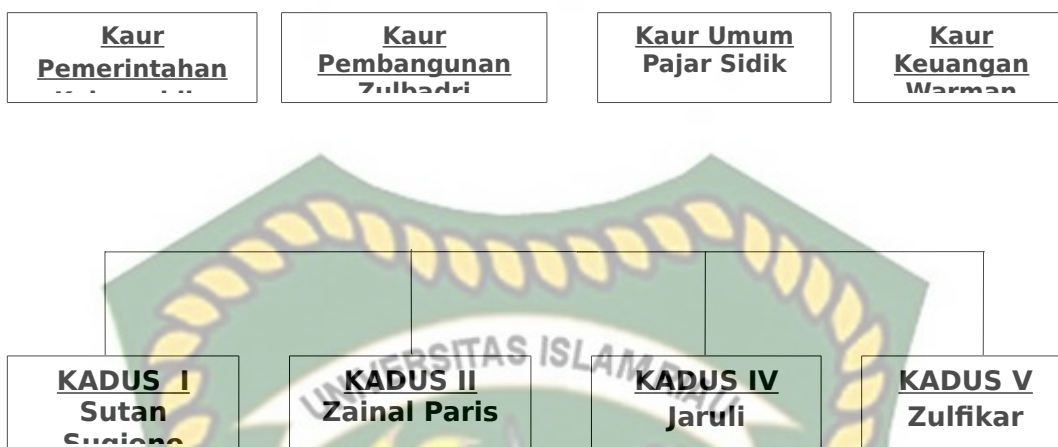
Sumber: Kaur Pemerintahan tahun 2018

Dari tabel IV.7 diatas memberikan keterangan yang jelas bahwa struktur organisasi dan kelembagaan yang ada di desa Gema sangat padat dan mempunyai anggota yang banyak. Disatu sisi, kondisi diatas akan berdampak positif karena memiliki banyak anggota kelembagaan sehingga memudahkan lembaga untuk menjalankan program, akan tetapi disisi lain bisa juga berdampak negatif yang berakibat sulitnya terjalin koordinasi antar lembaga-lembaga yang ada.

Sedangkan untuk Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gema, terdapat 4 (empat) kaur dan 4 (empat) Kepala Dusun. Struktur tersebut terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar IV.1
Struktur Pemerintahan Desa Gema





Sumber: Kaur Pemerintahan 2018

Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan kerja unit-unit Organisasi Pemerintahan Desa, maka dijelaskan kedudukan tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam struktur Pemerintah Desa sebagai berikut :

1. Kepala Desa

a. Kepala Desa mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan
- 2) Menyelenggarakan urusan Pembangunan
- 3) Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan

b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan

bersama BPD;

- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai

APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan

- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan.
c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai

kewajiban :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan dibidang ketatausahaan dan memimpin kesekretariatan desa. Sesuai dengan kedudukan tersebut Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok :

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
- 2) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretaris Desa;
- 3) Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretaris Desa dan keadaan umum desa;
- 4) Merumuskan program kegiatan kepada Kepala Desa;
- 5) Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan;
- 6) Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
- 7) Menyusun rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa;
- 8) Mengadakan kegiatan Anggaran Penerimaan Belanja Desa;
- 9) Melaksanakan kegiatan pencatat mutasi tanah dan mencatat administrasi pemerintahan;
- 10) Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa;
- 2) Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3) Melaksanakan administrasi pemerintahan;
- 4) Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa;
- 5) Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertanahan sipil;
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi Peraturan dan Keputusan Desa;
- 7) Melaksanakan, mengawasi serta membina kegiatan sosial politik lainnya; dan

- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa;
- 2) Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
- 3) Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan; dan
- 4) Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

5. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Pemerintahan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- 1) Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan;
- 3) Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa;
- 4) Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa;
- 5) Merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

6. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa baik kedalam maupun keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
- 2) Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah lainnya;
- 3) Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan kantor;
- 4) Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;
- 5) Melaksanakan, mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor, dan bangunan lain milik desa;
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur desa;
- 7) Melaksanakan pengolahan buku administrasi desa;
- 8) Mencatat investasi kekayaan desa;
- 9) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumah-tangga pada umumnya; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

6. Kepala Dusun

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dinyatakan Kepala Dusun adalah pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu.

- a. Kedudukan Kepala Dusun adalah sebagai pelaksana tugas Kepala Desa diwilayahnya.
- b. Tugas Kepala Dusun adalah melaksanakan tugas-tugas wilayah kerjanya.
- c. Fungsi Kepala Dusun adalah :
 - 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - 2) Melaksanakan keputusan Desa diwilayah kerjanya;
 - 3) Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

d. Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

7. Tugas, Fungsi dan Susunan BPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, menyatakan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, juga menyebutkan bahwa wewenang BPD yakni :

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- 6) Menyusun tata tertib BPD.

Selain mempunyai wewenang, Anggota BPD juga mempunyai kewajiban

sebagai berikut :

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional dan keutuhan NKRI
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 5) Memproses pemilihan Kepala Desa;
- 6) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- 7) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gema berdasarkan SK Bupati Kampar Nomor : 144/PEM/66/2012 berjumlah 9 (Tujuh) orang. Adapun susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di

Desa Gema adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Yusta, S.Pd
2. Wakil Ketua : Drs. Bustar
3. Sekretaris : Sujarman
4. Anggota :
 - 1) Heri Anwar
 - 2) Mastor
 - 3) Mujazi S.Pdi
 - 4) Helmiati
 - 5) Zul Anwar
 - 6) Saifuddin Al-Marawi



BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu "*Metode Diskriptif Kuantitatif*". Metode Diskriptif Kuantitatif merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data yang telah terkumpul diproses, disusun dan kemudian dianalisa yang selanjutnya di interpretasikan agar memberikan hasil yang jelas terhadap penelitian. Sebelum menyajikan hasil penelitian, maka pada analisis data ada beberapa tahapan yang mesti dijelaskan terlebih, diantaranya:

5.1.1. Gambaran Subjek Penelitian

Dalam pengembangan dan pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan data yang bersumber dari wawancara (*informan*) dengan pemerintah desa kemudian dari kuisioner (*responden*) dengan masyarakat. Pemaparan gambaran identitas informan dan responden sebagai upaya untuk menjelaskan keragaman dari subjek penelitian yang dijadikan sampel sehingga data yang digunakan merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam mendeskripsikan identitas informan dan responden lebih dipaparkan pada aspek jenis kelamin, tingkat umur dan tingkat pendidikan.

A. Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin dari informan dan responden penelitian “Pengelolaan Potensi Desa Dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1
Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Informan dan Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Informan/Pemerintahan Desa Gema	7	1	8 orang
2	Responden/Masyarakat Gema	28	12	40 orang

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa informan dari Pemerintahan Desa Gema terdiri dari 7 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan responden dari kalangan masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 28 orang dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 12 orang. Hal ini menunjukkan bahwa informan dan responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh kaum laki-laki.

B. Berdasarkan Tingkatan Umur

Pada aspek umur dapat memberikan gambaran kondisi umur informan dan responden, dimana umur memberikan ukuran kematangan seseorang dalam menilai fenomena mengenai pelaksanaan pengelolaan potensi desa dalam pembangunan Desa Gema dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.2
Informan dan Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Informan	Responden
1	21-25	-	-
2	26-35	2	6
3	36-45	3	21
4	46-55	2	10

5	56 keatas	1	3
	Jumlah	8	40

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui bahwa pada tingkat umur 26-35 tahun, ada 2 orang informan dan 6 orang responden. Pada tingkat umur 36-45 tahun, ada 3 orang informan dan 21 orang responden. Pada tingkat umur 46-55 tahun, ada 2 orang informan dan 10 orang responden sedangkan pada tingkat umur 56 keatas ada 1 orang informan dan 3 orang responden.

Dikarenakan informan dan respoden penelitian pada tingkat umur 36-45 tahun dan 46-55 tahun cukup besar maka dapat dikatakan bahwa informan dan responden tergolong dewasa dan cukup matang dalam berfikir serta dianggap memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak dalam rangka pengelolaan potensi desa dalam pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

C. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan informan dan responden merupakan tolak ukur dalam mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman responden dalam menilai pengelolaan potensi desa untuk pembangunan yang ada pada saat ini. Untuk lebih jelas tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3
Tingkat Pendidikan Informan dan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Informan	Responden
1	SD	-	2
2	SLTP	-	5
3	SLTA/Sederajat	3	15
4	Diploma	2	1
5	S1	3	15
6	S2	-	2
	Jumlah	8	40

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat diketahui bahwa secara umum, pada tingkat pendidikan SD tidak ada yang jadi informan dan hanya 2 orang dari responden. Pada tingkat pendidikan SLTP, tidak ada dari informan dan 5 orang dari responden. Pada tingkat pendidikan SLTA, ada 3 orang informan dan 15 orang responden. Pada tingkat pendidikan Diploma, ada 2 orang informan dan 1 orang responden. Pada tingkat pendidikan S1 ada 3 orang informan dan 15 orang responden sedangkan pada tingkat pendidikan S2 tidak ada dari informan dan 2 orang dari responden.

Dari tabel V.3 diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya informan dari pemerintahan desa dan responden dari masyarakat Desa Gema sudah berada pada tingkat pendidikan SLTA sampai S2. Ini membuktikan bahwa pernyataan dan jawaban yang diberikan berkenaan dengan pengelolaan potensi desa dalam pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

5.2. Hasil Penelitian

5.2.1. Pengelolaan Potensi Desa Dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Pengelolaan mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan. Pada defenisi lain, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sektor sumber daya yang ada menurut suatu perencanaan diperlukan

untuk penyelesaian tujuan kerja tertentu. Sedangkan pengelolaan potensi desa adalah kemampuan pemerintah desa dalam menggali, mengelolah dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa.

Sejalan dengan itu, pengelolaan potensi desa dalam penelitian ini yaitu sejauh mana pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu mengelolah dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa Gema untuk menghasilkan pendapatan dan selanjutnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan potensi-potensi yang ada di desa dalam pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. maka dalam hal ini peneliti merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 8 ayat 3 huruf e menjelaskan bahwa desa memiliki potensi-potensi yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi pendukung/lokal.

Berangkat dari undang-undang di atas, maka peneliti menjadikan ketiga sumber tersebut sebagai indikator dalam mengetahui dan menganalisis potensi yang ada di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

A. Pengelolaan Potensi Desa Dari Sektor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki akal perasaan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya Pemerintahan Desa Gema dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi Pemerintahan Desa Gema itu untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu, Pemerintah Desa Gema harus mampu menggali dan mengelolah potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Potensi tersebut berupa: kompetensi, kreatifitas, berjiwa wirausaha, inovatif, gotong royong, partisipatif dan kerjasama.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan potensi di sektor sumber daya manusia, peneliti telah mengajukan kuisisioner kepada 40 orang responden sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4
Pengelolaan Potensi dari Sektor Sumber Daya Manusia

Sektor	Jenis Potensi	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Sumber daya manusia	Kompetensi/Skill	5	11	24	40
	Kreatifitas	8	15	17	40
	Kewirausahaan	6	10	24	40
	Inovatif	3	8	29	40
	Gotong Royong	5	8	27	40
	Partisipatif	9	11	20	40
	Kerjasama	12	17	11	40

Total	48	80	152	280
Persentase	17%	29%	54%	100%
Hasil	Cukup Baik			

Sumber: Hasil Olahan Penelitian 2018

Dari tabel V.4 di atas dapat diketahui bahwa dari 280 total jawaban responden tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam pembangunan desa gema sebanyak 48 jawaban responden dengan tingkat persentase 17% berada pada kategori baik. Sebanyak 80 jawaban responden dengan tingkat persentase 29% berada pada kategori cukup baik sedangkan 152 jawaban responden dengan tingkat persentase 54% berada kategori kurang baik.

Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan potensi Desa Gema pada sektor sumber daya manusia terhadap pembangunan desa selama ini sudah terealisasi dengan cukup baik. Itu artinya, Pemerintah Desa Gema belum mampu menggali dan mengelolah dengan baik potensi-potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di Desa Gema tersebut.

Dari pendalaman data penelitian yang peneliti dapatkan dari Kantor Desa Gema Bagian Pembangunan, dapat peneliti sampaikan bahwa hampir seluruh anggaran dana desa dalam satu tahun anggaran dipakai untuk pembangunan fisik, sehingga anggaran untuk program pengembangan sumber daya manusia

tidak bisa dilakukan karena tidak ada anggaran. Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.5
Pembangunan Fisik Desa Gema Tahun 2016-2018

Tahun	Jenis Pembangunan Fisik	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
2016	1. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase/gorong-gorong di Desa Gema	400.000.000	Pemerintah
	2. Turap	600.000.000	Pemerintah
2017	1. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase/gorong-gorong di Desa Gema	260.000.000	Pemerintah
	2. Kegiatan peningkatan jalan dan jembatan di Desa Gema	400.000.000	Pemerintah
2018	1. Kegiatan pembangunan drainase di Desa Gema	480.000.000	Pemerintah
	2. Kegiatan peningkatan jalan dan jembatan di Desa Gema	550.000.000	Pemerintah

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Hal tersebut di atas dapat memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh Pemerintahan Desa Gema. Sumber daya manusia merupakan kekuatan pembangunan. Keterangan tersebut relevan dengan pendapat yang disampaikan oleh **Kaur Pembangunan Desa Gema**, mengatakan:

“Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah desa lebih memfokuskan pembangunan di bidang fisik, seperti: Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase/gorong-gorong di Desa Gema, Turap, Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase/gorong-gorong di Desa Gema, Kegiatan peningkatan jalan dan jembatan di Desa Gema, Kegiatan pembangunan drainase di Desa Gema dan Kegiatan

peningkatan jalan dan jembatan di Desa Gema. Hal ini sengaja dilakukan agar seluruh akses yang menghubungkan Desa Gema dengan desa-desa yang lain bisa berjalan baik” (sumber: wawancara dengan Bapak Zulbadri, tanggal 30 November 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan potensi desa gema pada sektor sumber daya manusia belum terlaksana dengan baik karena pemerintahan desa lebih fokus pada pembangunan fisik, berupa pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, drainase dan turap lain-lain. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Gema belum dikelola dengan baik oleh pemerintah desa sehingga sumber daya tersebut belum mampu menjadi sumber pendapatan bagi Desa Gema.

B. Pengelolaan Potensi Desa Gema dari Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh alam, baik di darat, laut maupun udara dan memiliki nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Secara geografis dan demografis, desa gema termasuk desa yang sangat strategis karena merupakan Pusat Ibu Kota Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan memiliki kondisi alam yang sangat mendukung untuk sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan maupun pariwisata alam.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan potensi di sektor sumber daya alam, peneliti telah mengajukan kuisisioner kepada 40 orang responden sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.6
Pengelolaan Potensi dari Sektor Sumber Daya Alam

Sektor	Jenis Potensi	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Sumber daya alam	Pembinaan kebun petani karet	8	14	18	40
	Pembinaan kebun petani sawit	10	9	21	40
	Pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan palawija	11	14	15	40
	Pelestarian arum jram wisata	3	8	29	40
	Pemanfaat sungai untuk keramaba/tambak ikan	13	12	15	40
	Pelestarian Wisata alam Tebing Pinggiran Sungai Subayang	2	4	34	40
	Tambang galian C	4	9	27	40
	Pemanfaatan kawasan hutan menjadi tempat wisata	1	2	37	40
Total		52	72	196	320
Persentase Hasil		16%	23%	61%	100%
			Cukup Baik		

Sumber: Hasil Olahan Penelitian 2018

Dari tabel V.6 di atas dapat diketahui bahwa dari 320 total jawaban responden tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan Desa Gema sebanyak 52 jawaban responden dengan tingkat persentase 16% berada pada kategori baik. Sebanyak 72 jawaban responden dengan tingkat

persentase 23% berada pada kategori cukup baik sedangkan 196 jawaban responden dengan tingkat persentase 61% berada kategori kurang baik.

Berdasarkan hasil kuisioner tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan potensi desa gema pada sektor sumber daya alam terhadap pembangunan desa selama ini sudah terealisasi dengan cukup baik. Itu artinya, pemerintah desa gema belum mampu menggali dan mengelolah dengan baik potensi-potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam yang ada di Desa Gema tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan **Ketua BPD Desa Gema** mengatakan:

Ada dua keistimewaan yang dimiliki oleh desa gema, yaitu:

1. *Dari kondisi geografis desa gema termasuk desa yang sangat strategis. Karena memiliki kondisi yang sangat cocok untuk bertani, berkebun maupun maupun beternak. Adanya kebun sawit, adanya masyarakat bertani pangan dan palawija, adanya perkebunan karet, arum jram, adanya yang sudah di beton, adanya sungai, adanya hutan, adanya tambang galian c, adanya tanaman hijau, adanya tanah kas desa.*
2. *Dari kondisi demografi, Desa Gema merupakan Ibu Kota Kecamatan Kampar Kiri Hulu, desa gema menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian karena memiliki pasar desa dan juga mempunyai dermaga/tambatan perahu tempat persinggahan 15 desa yang ingin pergi ke pasar gema. Semestinya kondisi seperti ini mampu dijadikan sumber pendapatan bagi desa maupun masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya itu semua tidak mampu dikelolah dengan baik oleh desa (sumber: wawancara dengan Ketua BPD tanggal 29 November 2018).*

Dari wawancara dengan ketua BPD di atas, kemudian peneliti ingin lebih dalam menggali informasi tentang pengelolaan sumber daya alam dengan mewawancarai **Kepala Desa Gema**, beliau mengatakan:

“Pemerintah desa selama ini hanya fokus mengelola dan memanfaatkan potensi desa pada sektor hasil kekayaan desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Adapun deskripsi tentang pengelolaan potensi desa dalam hal ini adalah pengelolaan pendapatan asli desa Gema. Hasil kekayaan desa menyangkut tentang penghasilan yang diterima desa dari pemanfaatan atau penggunaan kekayaan desa. Kondisi desa yang memiliki potensi, baik dari perkebunan, perikanan, pertanian dan sebagainya menjadikan desa kaya dengan keanekaragaman tersebut. Dalam hal ini Desa Gema hanya memperoleh dukungan dari fee tanah kas desa yaitu kebun karet seluas 2 hektar. Adapun besarnya fee dari kekayaan desa dari tanah kas desa tersebut pada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada uraian berikut ini : tahun 2008 sebesar Rp 1.500.000,- tahun 2009 sebesar Rp 2.460.000,- tahun 2010 sebesar Rp 1.500.000,- tahun 2011 sebesar Rp 2.106.000,- dan tahun 2012 sebesar Rp 1.050.000,-. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah usaha lain yang diselenggarakan oleh desa yang dijadikan sebagai pendapatan asli desa, misalnya pungutan desa, leges desa dan lain-lain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Dalam hal ini Desa Gema memperoleh dukungan dari fee ganti ongkos cetak surat/blangko dan galian golongan C (sumber: wawancara dengan Kepala Desa Gema pada tanggal 30 November 2018 di ruang kerja kepala desa).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan asli desa gema pada sektor sumber daya alam berasal dari hasil kebun karet desa, fee ganti ongkos cetak surat/blangko dan galian golongan C. Padahal kalau dikelolah potensi-potensi sumber daya alam yang terkandung di Desa Gema, pasti akan menambah sumber pendapatan asli desa. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan menjadi sumber ekonomis bagi warga setempat.

C. Pengelolaan Potensi Desa Dari Sektor Sumber Daya Ekonomi Lokal

Sumber daya ekonomi lokal adalah segala sumber daya yang dimiliki berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia setempat, baik itu yang berasal dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan (*benefit*), serta dapat diolah sebagai modal dasar dalam pembangunan ekonomi. Disisi lain, Sumber daya ekonomi lokal merupakan salah satu bentuk inovasi dan kreatifitas warga tempatan dalam mengelolah sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, seperti: pengelolaan pasar, pengelolaan dermaga/tambatan perahu, pengelolaan tempat pelelangan ikan maupun pembinaan usahan mikro dan penciptaan peluang kewirausahaan.

Tabel V.7
Pengelolaan Potensi dari Sektor Sumber Daya Ekonomi Lokal

Sektor	Jenis Potensi	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Sumber daya ekonomi lokal	Pengelolan Pasar desa	9	13	18	40
	Pengelolaan Tambatan perahu/dermaga	10	14	16	40
	Pengelolaan Tempat pelelangan ikan	15	6	19	40
	Pembinaan kewirausahaan	3	19	18	40
Total		37	52	71	160

Persentase	23%	33%	44%	
Hasil	Cukup Baik			

Sumber: Hasil Olahan Penelitian 2018

Dari tabel V.7 di atas dapat diketahui bahwa dari 160 total jawaban responden tentang pengelolaan sumber daya ekonomi lokal dalam pembangunan desa gema sebanyak 37 jawaban responden dengan tingkat persentase 23% berada pada kategori baik. Sebanyak 52 jawaban responden dengan tingkat persentase 33% berada pada kategori cukup baik sedangkan 71 jawaban responden dengan tingkat persentase 44% berada kategori kurang baik.

Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan potensi Desa Gema pada sektor sumber daya ekonomi lokal terhadap pembangunan desa selama ini sudah terealisasi dengan cukup baik. Itu artinya, Pemerintah Desa Gema belum mampu menggali dan mengelolah dengan baik potensi-potensi sumber daya ekonomi lokal yang ada di Desa Gema tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan **Sekretaris Desa Gema**, beliau mengatakan:

“Sudah banyak cara dan program yang sudah lakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Akan tetapi program yang kami lakukan seringkali mengalami hambatan sehingga sulit mencapai sasaran. Padahal disisi lain, Desa Gema sudah dilengkapi dengan segala fasilitas penunjang lainnya. Adanya kelompok SPP ibu mandiri, adanya (P4K) program peningkatan, pendapatan petani dan nelayan kecil, adanya usaha pembuatan kerupuk, adanya bengkel motor, adanya bengkel las, adanya

bengkel elektronik, adanya pangkalan minyak tanah, adanya pengecer bensin, adanya warung minuman dan makanan, tambatan perahu/dermaga, pasar desa, tempat pelelangan ikan, jalan umum skala propinsi, jalan desa penghubung dusun, jalan setapak/gang dan balai desa. Maka dalam hal ini, pemerintah desa mengakui belum begitu maksimal dalam menciptakan maupun mengelolah sumber ekonomi lokal yang ada di Gema” (sumber: wawancara dengan Sekdes Gema pada tanggal 30 Novemberr 2018

Disisi lain, untuk menutupi sumber pendapatan dari sektor ekonomi lokal pemerintah desa gema menfokuskan pada biaya ganti ongkos cetak surat/blangko. Berdasarkan Perdes Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Biaya Ganti Ongkos Cetak Surat/Blangko, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8
Uraian Biaya Ganti Ongkos Cetak Surat/Blangko

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Ganti Ongkos Cetak Blangko Surat-Surat :	
	- Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp 10.000
	- Pengantar Kartu Keluarga (KK)	Rp 20.000
2	Biaya Legalisasi Surat-Surat :	
	- Rekomendasi Surat Untuk Menikah	Rp 25.000
	- Rekomendasi Keterangan Usaha	Rp 20.000
	- Keterangan Pindah	Rp 10.000
	- Keterangan Miskin/Kurang Mampu Untuk Berobat	Rp -
	- Keterangan Miskin/Kurang Mampu Untuk Beasiswa	Rp 10.000
	- Keterangan Kematian	Rp 10.000
	- Keterangan Catatan Kepolisian	Rp 10.000
	- Keterangan Berdomisili	Rp 10.000
	- Keterangan Bukan PNS	Rp 10.000
	- Keterangan Belum Pernah Menikah	Rp 10.000
	- Keterangan Kelahiran	Rp 10.000
	- Keterangan Pernah Menikah	Rp 10.000
	- Registrasi Surat Tanah	Rp 10.000
	- Keterangan Lainnya	Rp 10.000

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Dari data yang peneliti dapatkan dari **Kaur Keuangan Pemerintah Desa Gema** dapat diketahui hasil dari Ganti Ongkos Cetak Surat/Blangko tersebut pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada uraian berikut ini :

- Tahun 2013 sebesar Rp 1.100.000,-
- Tahun 2014 sebesar Rp 1.090.000,-
- Tahun 2015 sebesar Rp 2.100.000,-
- Tahun 2016 sebesar Rp 2.580.174,-
- Tahun 2017 sebesar Rp 2.450.000,-

Sedangkan galian golongan C, pemerintah desa mulai mengelolanya pada tahun 2017. Hasil galian golongan C tersebut yaitu sebanyak 1 perusahaan sebesar Rp 1.800.000,-. Sedikitnya hasil yang didapat karena pemerintah desa pada tahun 2017 tidak memungut uang hasil galian golongan C tersebut secara maksimal. Hasil dari pengelolaan potensi desa tersebut hanya digunakan sebagai dana tambahan untuk belanja bantuan sosial. Sementara untuk pembangunan fisik tidak ada karena sedikitnya hasil dari pengelolaan potensi desa tersebut. Selain itu karena hasil swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat tidak ada.

Penjelasan data diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak **Kaur**

Pemerintahan Desa Gema yang mengatakan bahwa:

“Kepala Desa sudah membuat suatu perencanaan pengelolaan potensi desa dan telah menyampaikan kepada BPD. Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang menentukan sendiri perencanaan pengelolaan potensi desa dan tidak ada mengajak masyarakat untuk ikut bermusyawarah. Selain itu, PADesa yang dikelola hanya hasil kekayaan desa yaitu tanah kas desa dan lain-lain PADesa yang sah yaitu ganti ongkos cetak surat/blangko dan galian golongan C (sumber: wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Gema pada tanggal 29 November 2018)

Pembangunan fisik yang dilaksanakan dari hasil pengelolaan PADesa tidak ada, karena sedikitnya hasil dari pengelolaan PADesa dan karena swadaya dan partisipasi serta gotong royong dari masyarakat tidak ada. Hasil pengelolaan PADesa hanya digunakan sebagai dana tambahan untuk belanja bantuan sosial.

Untuk mengetahui pengelolaan potensi desa dalam pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat dari

pengelolaan 3 potensi yang sudah peneliti jelaskan pada pembahasan diatas sebagaimana peneliti jelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.9
Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan
Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Sektor	Jenis Potensi	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Sumber daya manusia	Kompetensi/Skill	5	11	24	40
	Kreatifitas	8	15	17	40
	Kewirausahaan	6	10	24	40
	Inovatif	3	8	29	40
	Gotong Royong	5	8	27	40
	Partisipatif	9	11	20	40
	Kerjasama	12	17	11	40
Sumber daya alam	Pembinaan petani kebun karet	8	14	18	40
	Pembinaan petani kebun sawit	10	9	21	40
	Pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan palawija	11	14	15	40
	Pelestarian wisata arum jram	3	8	29	40
	Pemanfaat sungai untuk keramaba/tambak ikan	13	12	15	40
	Pelestarian Wisata alam Tebing Pinggiran Sungai Subayang	2	4	34	40
	Tambang galian C	4	9	27	40
	Pemanfaatan kawasan hutan menjadi tempat wisata	1	2	37	40
Sumber daya ekonomi lokal	Pengelolaan Pasar desa	9	13	18	40
	Pengelolaan Tambatan perahu/dermaga	10	14	16	40
	Pengelolaan Tempat pelelangan ikan	15	6	19	40
	Pembinaan kewirausahaan	3	19	18	40
Total		137	204	419	760
Persentase Hasil		18%	27%	55%	100%
		Cukup Baik			

Sumber: Hasil Olahan Penelitian 2018

Dari tabel V.9 di atas tentang pengelolaan potensi desa dalam pembangunan Desa Gema diketahui bahwa terdapat 760 total jawaban. Sebanyak 137 jawaban responden atau 18% responden memberikan tanggapan bahwa pengelolaan potensi desa dalam pembangunan sudah terealisasi dengan baik. Sebanyak 204 jawaban responden atau 27% responden memberikan tanggapan bahwa pengelolaan potensi desa dalam pembangunan sudah terealisasi dengan cukup baik dan sebanyak 419 jawaban responden atau 55% responden memberikan tanggapan bahwa pengelolaan potensi desa dalam pembangunan sudah terealisasi dengan kurang baik.

Berdasarkan hasil data kuisisioner tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan potensi Desa Gema pada pembangunan desa selama ini secara keseluruhan sudah terealisasi dengan cukup baik. Itu artinya, Pemerintah Desa Gema belum mampu mengelolah dengan baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lokal yang ada di Desa Gema tersebut.

Ketidak mampuan desa dalam mengelolah sumber potensi yang ada di Desa Gema berdampak kepada sumber pendapatan asli desa maupun terhadap peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa tempatan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan **Kadus II Desa Gema** mengatakan:

“Terkategori kurang baiknya perencanaan pengelolaan potensi desa dikarenakan Kepala Desa dalam membuat perencanaan pengelolaan potensi desa hanya mengikut sertakan BPD dan tidak ada mengikut sertakan masyarakat. Selain itu, PADesa yang dikelola hanya sektor hasil kekayaan desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pemerintah desa juga belum menggunakan hasil PADesa untuk membiayai pembangunan desa secara optimal. Selain itu, karena Kepala Desa hanya mengikut sertakan Sekretaris Desa dan BPD saja dalam pengelolaan potensi desa tanpa mengikut sertakan masyarakat, sehingga menyebabkan tidak adanya swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat (sumber: wawancara dengan Kadus II Desa Gema pada tanggal 30 November 2018).

Pemerintah desa juga kurang memahami bagaimana mengelola potensi dengan baik dan belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik. Hasil pengelolaan potensi desa hanya digunakan sebagai dana tambahan untuk belanja bantuan sosial. Kemudian pertanggungjawaban pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa selaku penanggungjawab juga kurang baik, karena seringkali pemerintah desa terlambat dalam melaporkan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat.

5.2.2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Dalam pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan maupun pengelolaan, pemerintah desa seringkali mengalami dan merasakan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Sebab kedua hal tersebut merupakan konsekuensi yang mesti dihadapi oleh setiap orang maupun organisasi pemerintahan. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengelolaan potensi desa dalam pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dan dan observasi, ada dua poin yang menjadi faktor pendukung Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Pendapatan asli desa Gema didukung dengan adanya potensi desa yang sangat potensial untuk dikembangkan, seperti keadaan alam dengan dilalui oleh sungai Kampar Kiri sehingga Desa Gema memiliki potensi untuk pengembangan tempat rekreasi, keramba atau tambak ikan, dermaga sebagai tempat tambatan perahu dan tempat pemancingan ikan.
2. Desa Gema memiliki faktor alam yang subur artinya sangat potensial dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga pendapatan asli desa Gema tidak hanya bersumber dari tanah kas desa, ganti ongkos cetak surat/blanko dan galian golongan C saja akan tetapi juga bersumber dari hasil pertanian dan perkebunan yang telah dikelola dengan baik.

B. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, di Desa Gema juga terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan potensi desa, antara lain :

- a. Pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa seperti BPD belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk penyelenggaraan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa khususnya pada pengelolaan potensi desa. Hal itu salah satunya terlihat dari tidak terlaksananya koordinasi antar perangkat desa maupun koordinasi dengan masyarakat dalam mengelola keuangan desa.
- b. Tidak adanya pembekalan dari segi pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan lembaga-lembaganya dalam hal pengelolaan potensi desa.

- c. Tingginya ketergantungan desa dengan Pemerintah Kabupaten. Sehingga pelaksanaan pembangunan selalu berharap kepada bantuan Pemda. Berikut uraian data tentang anggaran pendapatan desa Gema pada tahun 2018 :

Tabel V.10
Pendapatan Desa Gema Tahun Anggaran 2018

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan asli desa	Rp 5.300.000	2%
	- Hasil kekayaan desa	Rp 1.050.000	
	- Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	Rp 4.250.000	
2	Dana perimbangan	Rp 279.877.056	98%
	Jumlah	Rp 285.177.056	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2018

Dari tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa Desa Gema masih sangat tergantung kepada Pemerintah Kabupaten. Hal itu terlihat dari APBDesa Gema 98% berasal dari Pemerintah Kabupaten, sementara pendapatan asli desa hanya sebesar 2%.

- d. Tidak adanya hasil swadaya dan partisipasi serta gotong royong dari masyarakat desa, karena pemerintah desa tidak ada melibatkan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Sehingga berdampak pada sedikitnya pendapatan asli desa yang didapat oleh desa.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1) Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebanyak 137 jawaban responden atau 18% responden memberikan tanggapan bahwa pengelolaan potensi desa dalam pembangunan sudah terlaksana dengan baik. Sebanyak 204 jawaban responden atau 27% responden memberikan tanggapan bahwa pengelolaan potensi desa dalam pembangunan sudah terlaksana dengan cukup baik dan sebanyak 419 jawaban responden atau 55% responden memberikan tanggapan bahwa pengelolaan potensi desa dalam pembangunan sudah terlaksana dengan kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan potensi desa dalam pembangunan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik.

2) Faktor pendukung Pengelolaan Potensi Desa dalam Pembangunan Desa

Gema Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yaitu:

- 1.** Pendapatan asli desa Gema didukung dengan adanya potensi desa yang sangat potensial untuk dikembangkan, seperti keadaan alam dengan dilalui oleh sungai Kampar Kiri sehingga desa Gema memiliki potensi untuk pengembangan tempat rekreasi, keramba atau tambak

ikan, dermaga sebagai tempat tambatan perahu dan tempat pemancingan ikan.

2. Desa Gema memiliki faktor alam yang subur artinya sangat potensial dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga pendapatan asli desa Gema tidak hanya bersumber dari tanah kas desa, ganti ongkos cetak surat/blanko dan galian golongan C saja.
- 3) Faktor penghambat dalam pengelolaan potensi Desa Gema, antara lain :
 1. Pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa seperti BPD belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk penyelenggaraan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa khususnya pada pengelolaan potensi desa. Hal itu salah satunya terlihat dari tidak terlaksananya koordinasi antar perangkat desa maupun koordinasi dengan masyarakat dalam mengelola keuangan desa.
 2. Tidak adanya pembekalan dari segi pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan lembaga-lembaganya dalam hal pengelolaan potensi desa.
 3. Tingginya ketergantungan desa dengan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten saat ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di desanya, seperti dengan memberi bantuan keuangan yang diberikan sekali setahun yang mana dana ini dapat digunakan oleh desa untuk melaksanakan pembangunan.
 4. Tidak adanya hasil swadaya dan partisipasi serta gotong royong dari masyarakat desa, karena pemerintah desa tidak ada melibatkan

masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Sehingga berdampak pada sedikitnya pendapatan asli desa yang didapat oleh desa.

6.2. Saran

- 1) Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar mampu memberikan dukungan materil maupun moril dalam pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi yang ada di Desa Gema
- 2) Disarankan kepada Pemerintahan Desa Gema supaya lebih maksimal dalam menggali dan mengelolah potensi yang ada di Desa Gema. Supaya potensi-potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mampu menjadi pendapatan bagi desa.
- 3) Disarankan kepada masyarakat Desa Gema supaya lebih mandiri dalam mengelolah potensi-potensi yang ada disekitarnya. Supaya potensi dari sumber daya alam dan sumber ekonomi lokal dapat dikembangkan oleh masyarakat menjadi sumber pendapatan yang bernilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamita, Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Alfian, 2018. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Arif, Muhammad, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*, RedPost Press, Pekanbaru.
- Awang, Azam, 2006. *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat (Kajian Pergeseran Struktur dan Fungsi Desa di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau)*. Unri Press, Pekanbaru.
- Chabib Soleh, Heru Rochma, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokus Media, Jakarta.
- F. Isjwara, 2009. *Pengantar Ilmu Politik*, Padjadjaran: Putra A Bardin.
- Hamim, Sufian, 2003. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen (Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi)*, UIR Press, Pekanbaru.
- Josef, Kaho Riwu, 2001. *Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Monang, Sitorus, 2009. *Manajemen Pelayanan Publik*, Unpad Press, Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Nur Mulyani, Sri dkk.2009. *Ekonomi*, Jakarta: Cakra Media
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu, 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Purnomo, Hari, 2004. *Perencanaan dan Perancangan Fasilitas*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

- Salam, Dharma Setyawan, 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Saragi, Tumpal P, 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, CV. Cipruy, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Administrasi Pembangunan, konsep, dimensi, dan strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2005. *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2008. *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soejono dan Abdurrahman, 1999. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, Edi, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Syaukani, 2004. *Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat*, Nuansa Madani, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Rauf Rahyunir, Maulidah Sri, 2015. *Pemerintahan Desa*, Nusamedia, Yogyakarta.
- Widjaya, H.A.W, 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wursanto, 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, UIR Press, Pekanbaru.

DOKUMENTASI

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 06 Tahun 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau